



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **ANALISIS EFEKTIFITAS BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang)**

### **SKRIPSI**



**ROSANALianti RAHMADINA  
04153093**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas belanja daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang, Dalam menilai tingkat efektivitas belanja daerah untuk pelayanan publik, perlu di mengerti dahulu lingkup pelayanan publik. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 16 (4) antara lain adalah : pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya memprioritaskan pada bidang yang dinilai memiliki keterkaitan paling erat dengan aspek kebutuhan masyarakat yaitu bidang kesehatan.*

*Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yaitu Lapaoran Realisasi Anggaran periode 2009 dan 2010. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sukunder. Penelitian dilakuan dengan membandingkan antara realisasi belanja daerah dengan target belanja daerah.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang telah dilaksanakan secara optimal dan mengalami peningkatan pada tahun 2010.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Penilaian Kinerja (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bukittinggi)”.

Pada kesempatan ini tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Papa Djonalis (alm) dan Mama Oktavarianti, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan, serta selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, S.E, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, M.A, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Drs. Suhandi, M.Si.Ak selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan begitu banyak waktu, kapanpun dan dimanapun untuk penulis dan memberikan arahan, nasehat serta saran selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suhairi, MSi, Ak selaku penelaah dalam seminar skripsi penulis. Terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan demi perbaikan skripsi penulis.
6. Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, Msi. Akt selaku pembimbing akademis penulis, dan semua dosen akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.
7. Uni Yani dan Da Romi yang telah membantu penulis dalam memperoleh data pada Pemerintah Kota Padang Panjang dan telah bersedia menjawab semua pertanyaan penulis selama menyelesaikan skripsi, terima kasih atas semua bantuannya.
8. Teman-teman seperjuangan, Mumut, Wuri, Nene, Rika, Tata, cici, Leona, Ila, Riska, Yuli, dan Ranti.

9. Pegawai biro Jurusan Akuntansi ( Buk Loli, Da Ari, dan Ni Eva) dan pengurus *Accounting Reading Room*. Terima kasih sudah membantu selama ini.
10. Teman-teman akuntansi angkatan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya.
11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Amin. Dan jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak untuk perbaikan.

Padang, April 2011

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah .....	10
2.1.1 Definisi Keuangan Daerah .....	10
2.1.2 Konsep Pelaksanaan Anggaran Daerah.....	11
2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah .....	12
2.2 Konsep Efisiensi dan Efektifitas Anggaran .....	16
2.2.1 Konsep dan Pengertian Efisiensi Anggaran .....	16
2.2.2 Konsep dan PengertianEfektifitas Anggaran.....	17
2.3 Dokumen Strategis .....	17



2.4	Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Keuangan Daerah .....	27
2.5	Konsep Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.....	28
2.5.1	Penerimaan Daerah .....	28
2.5.2	Pengeluaran Daerah.....	33
2.6	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	36
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian .....	37
3.2.1	Populasi Penelitian .....	37
3.2.2	Sampel Penelitian.....	37
3.3	Data dan Metode Pengumpulan Data.....	38
3.3.1	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.3.2	Metode Pengumpulan Data .....	39
3.4	Variabel Penelitian .....	39
3.5	Teknik Analisis Data.....	40

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang Panjang .....	41
4.1.1	Kondisi Geografis .....	41
4.1.2	Kondisi Perekonomian .....	42
4.1.3	Kondisi Pemerintahan .....	43
4.1.4	Kondisi Kesehatan.....	43
4.2	Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang .....	49
4.2	Proses/Prosedur Perencanaan dan Penganggaran	

Pemerintah Kota Padang .....	63
4.3 Arah Pembangunan Kota Padang Panjang.....	55
4.3.1 Visi .....	55
4.3.2 Misi.....	56
4.3.3 Tujuan.....	56
4.3.4 Sasaran .....	56
4.3.5 Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.....	57
4.3.6 Arah Kebijakan Anggaran Pengelolaan Belanja Daerah.....	58
4.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif .....	62
4.5 Program Pembangunan Daerah.....	64
4.6 Analisis Data dan Pembahasan .....	66
4.6.1 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2011.....	66
4.6.2 Perbandingan Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Pada Dinas Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010.....	81

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Implikasi dan Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 58 Tahun 2005.....	26
Tabel 2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1	Kriteria Tingkat Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Belanja Daerah.....	40
Tabel 4.1	PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2005-2007 (jutaan rupiah).....	42
Tabel 4.2	Data Kunjungan Pasien Dalam dan Luar Kota di RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2007.....	45
Tabel 4.3	Data Kunjungan Pasien di Puskesmas Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2007.....	45
Tabel 4.4	Jumlah Jam Pelatihan SDM .....	46
Tabel 4.5	Peralatan Medis di RSUD Kota Padang Panjang yang Mendukung Pencapaian Tujuan Akreditasi & Pusat Rujukan Respirasi .....	47
Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008.....	48
Tabel 4.7	Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Periode 2003 – 2007.....	51



Tabel 4.8	Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
	Kota Padang Panjang Periode 2003 – 2007.....	51
Tabel 4.9	Rencana dan Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan	
	Kota Padang Panjang Periode 2003 – 2007.....	52
Tabel 4.10	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang	
	Periode 2003-2007.....	54
Tabel 4.11	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang	
	Periode 2003-2007.....	55
Tabel 4.12	Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	.....	64
Tabel 4.13	Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .....	71
Tabel 4.14	Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .....	72
Tabel 4.15	Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur .....	72
Tabel 4.16	Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .....	73
Tabel 4.17	Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut Program Peningkatan	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	
	Kinerja dan Keuangan.....	73
Tabel 4.18	Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.....	74

Tabel 4.19 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Pengawasan Obat dan Makanan.....74

Tabel 4.20 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.....75

Tabel 4.21 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....75

Tabel 4.22 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Pengembangan Lingkungan Sehat.....76

Tabel 4.23 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Pencegahan Penyakit Menular.....76

Tabel 4.24 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.....77

Tabel 4.25 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut Program

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.....77

Tabel 4.26 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.....78

Tabel 4.27 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.....78

Tabel 4.28 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut

Program Penataan Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah.....79

Tabel 4.29 Hasil Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang Tahun 2010 berdasarkan Program

Pembangunan.....80

Tabel 4.30 Perbandingan Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota

Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 – 2010 .....82



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rincian Kota Padang Panjang Dinas Kesehatan Kota Tahun

Anggaran 2010

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rincian Kota Padang Panjang Dinas Kesehatan Kota Tahun

Anggaran 2011

Lampiran 3 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun

2008-2013



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Krisis multidimensional yang tengah melanda Indonesia telah menyadarkan kita untuk menggagas kembali konsep Otonomi Daerah (OTDA). Gagasan ini bertumpu pada pemikiran untuk menjamin tercapainya efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan. Penggagasan ini telah dimulai sejak bergulirnya Era Reformasi pada Tahun 1998 yang membawa dampak sangat luas pada perubahan tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Paradigma pembangunan di Indonesia pun bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang(UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang(UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Pemberlakuan kedua UU tersebut telah membawa perubahan pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menjalankan otonominya. Undang-undang ini juga telah memberi jawaban atas berbagai kritikan tentang pelaksanaan pembangunan yang begitu sentralistik, dimana peran pemerintah pusat sangat dominan, sehingga berdampak pada hasil pembangunan yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal, dan mematikan inisiatif dan kreatifitas daerah. Dengan hadirnya UU tersebut daerah



memiliki otonomi penuh untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan kunci bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Jika kita cermati tentang maksud pemberian otonomi daerah, untuk dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah (Mardiasmo, Jurnal Ekonomi Rakyat, Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah, 2002), yaitu :

- 1). Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah,
- 2). Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
- 3). Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan misi otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mendukung operasional pembangunan daerah. Salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam hal ini, anggaran daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dan menjadi poin penting dalam pengembangan efektifitas dan kapabilitas daerah. Fungsi lainnya adalah sebagai alat dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran daerah, serta membantu dalam pengambilan keputusan.

Mengingat kedudukan aspek keuangan daerah yang sangat urgen bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, maka terdapat beberapa aturan dan prinsip-prinsip penganggaran yang harus ditaati (Prasetyo, 2005), diantaranya :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan public,
- 2) Adanya kejelasan misi dalam pengelolaan keuangan daerah,
- 3) Desentralisasi dan pelibatan stakeholders,
- 4) Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan (value for money, transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas),
- 5) Bentuk dan struktur APBD serta anggaran berbasis kinerja, dan
- 6) Pengembangan sistem informasi keuangan dan transparansi laporan keuangan.

Namun demikian dalam prakteknya tetap saja terdapat celah yang menjadi permasalahan dalam mengimplementasikan manajemen keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah diatas. Diantaranya adalah sistem penganggaran tradisional yang bersifat line-item dan incremental, dimana proses penyusunan anggaran daerah semata-mata hanya didasarkan pada ketersediaan dana untuk item-item yang sudah ditentukan serta didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Adanya kecenderungan masih rendahnya kemauan politik untuk meningkatkan transparansi anggaran yang tercermin pada tingginya alokasi pada belanja aparatur dibandingkan dengan alokasi belanja publik, serta masih banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam proses penyusunan anggaran (Prasetyo, 2005). Disamping itu pada saat penyusunan anggaran berbagai pertanyaan akan muncul, bagaimana membawa kepentingan masyarakat ke dalam pernyataan anggaran yang mempunyai aspek kesejahteraan umum, bagaimana pengalokasian yang adil antara belanja aparatur dan belanja publik.

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas yang memungkinkan terjadinya inefisiensi dan inepektifitas penganggaran, maka disinilah kiranya esensi masyarakat sebagai fungsi kontrol menunjukkan urgensinya demi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintah. Dengan transparansi anggaran, kebocoran maupun penyimpangan implementasi kebijakan dapat ditekan, yang dampaknya akan dirasakan pada efisiensi dan efektifitas kebijakan itu sendiri.

Pemberiaan otonomi yang luas juga menjadi kunci partisipasi untuk menjadikan program pembangunan yang akan dilakukan lebih realistis, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan publik. Artinya peluang terjadinya ketidaktepatan, kebocoran, pemborosan, atau kesia-siaan anggaran dapat diperkecil seminimal mungkin. Kiranya APBD dapat menjadi contoh konkret pada implementasi otonomi daerah didalamnya kita akan menemukan kesungguhan dan komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan nasib rakyatnya.

Dalam dimensi efektifitas finansial, kita diajak melihat bahwa segala pendanaan yang dianggarkan dalam APBD harus wajar secara nominal dan bisa maksimal dari sisi pemanfaatan (nilai kegunaan). Dan bagaimana mekanisme penganggaran tersebut diterjemahkan dalam kebijakan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian kita dapat memastikan dana yang dianggarkan APBD adalah alokasi yang tepat, efektif, efisien, dan terhindar dari manipulasi.

Dalam menilai tingkat efektivitas belanja daerah untuk pelayanan publik, perlu di mengerti dahulu lingkup pelayanan publik. Menurut UU No. 17 Tahun

2003 pasal 16 (4) antara lain adalah : pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun dalam penelitian ini, tidak semua pelayanan publik tersebut akan menjadi kajian penilaian efektivitas belanja daerah. Penulis hanya memprioritaskan pada bidang yang dinilai memiliki keterkaitan paling erat dengan aspek kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah bidang kesehatan.

Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai lokasi studi didasarkan pada berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Setiap tahun, anggaran pengeluaran baik belanja modal dan belanja pemeliharaan serta belanja lainnya di alokasikan khususnya dalam rangka peningkatan dan pembangunan ekonomi di daerah melalui pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana bagi masyarakat. Pada tahun 2008 lalu, total belanja daerah Kota Padang Panjang mencapai Rp. 72,80 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar dimana Rp. 18,50 miliar dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Namun dalam kenyataannya, daerah-daerah di Sumatera Barat cenderung tertinggal dibanding dengan daerah-daerah di propinsi lain. Hal ini membuat penulis tertarik meneliti apakah pelaksanaan belanja pada kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Analisis Efektifitas Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang)"**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Pelaksanaan anggaran keuangan daerah di pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan anggaran yang benar akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan bagi daerah tersebut khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah dilaksanakan secara efektif dan bagaimana perbandingan efektifitas belanja daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, efektifitas pelaksanaan belanja daerah yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang saja khususnya pada Dinas Kesehatan saja. Penulis memfokuskan pembahasan mengenai efektifitas pelaksanaan belanja daerah yang diukur dengan membandingkan antara input dan output yaitu membandingkan antara jumlah target anggaran dengan jumlah realisasi anggaran yang dianalisis melalui studi deskriptif.



## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, dapat dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menilai efektifitas belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
- 2) Menilai Perbandingan efektifitas belanja daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini sangat bermanfaat terutama untuk:

- 1) Masukan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Kesehatan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan kinerja dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan serta peningkatan sumbangan pendapatan daerah dari sektor kesehatan di tingkat dinas.
- 2) Masukan bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian yang lebih luas.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, Pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teori yang berisi tentang konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, konsep efisiensi dan efektifitas anggaran, dokumen strategis anggaran, pengaruh kebijakan fiskal terhadap keuangan daerah, konsep penerimaan dan pengeluaran daerah, dan tinjauan penelitian terdahulu.
- BAB III** : Metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, variable penelitian, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Pembahasan yang berisi gambaran umum Kota Padang Panjang beserta Dinas Kesehatan terkait, pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang, Arah pembangunan Kota Padang Panjang, sarana dan prasarana kesehatan yang representative, program pembangunan daerah kota padang panjang, dan analisis data dan pembahasan.

**BAB V** : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian, serta implikasi dan saran untuk penelitian yang akan datang dan juga saran pada Pemerintah Kota Padang Panjang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **2.1.1 Definisi Keuangan Daerah**

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004 : 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD (Saragih, 3003 : 12).

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan klient dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yang ada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsi sebagai public

service maka persepsi aparat pemerintah daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi aparat pemerintah akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan begitu juga sebaliknya.

### **2.1.2 Konsep Pelaksanaan Anggaran Daerah**

Anggaran adalah rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan), untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono, 2005: 27). Anggaran digunakan untuk membantu manajemen untuk melihat dan mengontrol pelaksanaan visi, goals, objectives, strategi dan program-program. Anggaran untuk organisasi pemerintahan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD (Yuwono, 2005: 92).

Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan atau penyempurnaan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi,



demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Prinsip-prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi hal-hal berikut.(Yuwono, 2005:58), yaitu:

#### **1) Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran mencerminkan hubungan masyarakat sebagai penyumbang pemasukan APBD terbesar dari dana pajak dan retribusi dan pemerintah sebagai pelaksana amanat masyarakat. Usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam tahapan perencanaan patut direspon oleh pemerintah sehingga kegiatan yang direalisasikan dalam APBD mewujudkan wujud aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya. Tujuan umum yang ingin dicapai dari pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran adalah terciptanya suatu kondisi anggaran yang murni sehingga dapat menciptakan mekanisme pelaksanaan anggaran yang transparan.

#### **2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat,

meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang diinginkan dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan/ditetapkan.

### 3) Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

### 4) Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan-pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi

diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain ini, dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

#### 5) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Pemanfaatan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat, oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran daerah perlu diperhatikan:

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai,
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

#### 6) Taat Azas

Sebagai rencana tahunan pemerintahan daerah, APBD ditetapkan sebagai peraturan daerah dengan memperhatikan:

- a) APBD yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. APBD harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan peraturan pemerintah yang ada yang diakui

memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu rencana peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan publik bukan membebani masyarakat.

c) Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya.

7) *Value for money*, yakni diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran daerah yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*publik money*) tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *value for money* diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.



## **2.2 Konsep Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**

### **2.2.1 Konsep dan Pengertian Efisiensi Anggaran**

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- 1) Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input-output).
- 2) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
- 3) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- a) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.



- c) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- d) Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

### **2.2.2 Konsep dan Pengertian Efektivitas Anggaran**

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

### **2.3 Dokumen Strategis Anggaran**

Pelaksanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategis, prioritas, program, dan kegiatan yang hendak dicapai. Unsur-unsur tersebut diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen, antara lain :

#### **1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5

(lima) tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1) Maksud dan Tujuan

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan prioritas kepala daerah, kerangka kebijakan, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM disepakati sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra SKPD.

2) Kedudukan dan Fungsi

RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai:

- a) Acuan penyusunan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.
- b) Pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD.

3) Tahap Penyusunan Dokumen

Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa penyusunan RPJM Nasional/ Daerah dan RKP/ RKPD dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a) Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan
- b) Penyiapan Rancangan Rencana Kerja
- c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan
- d) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

Secara teknis, tahapan penyusunan dokumennya adalah :

- a) Menjabarkan visi, misi, program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
- b) Mengisi Sunbstansi RPJM Daerah.

Materi utama RPJM Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- c) Strategi Pembangunan Daerah.
- d) Kebijakan Umum.
- e) Program Kepala Daerah yang sudah dijabarkan dalam format Program SKPD dan Program Lintas SKPD, Program Kewilayahan, serta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## **2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (Lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

### 1) Kedudukan Renstra SKPD

Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra SKPD wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementrian/ Lembaga. Untuk itu, penerapan perencanaannya perlu direncanakan sehingga diketahui bagaimana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha guna mempertahankan pencapaian kinerja tersebut.

### 2) Maksud dan Tujuan :

- a) Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sebagai pedoman SKPD dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- b) Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi dan kewenangan SKPD. Tujuannya adalah menjabarkan visi SKPD yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- c) Rencana kegiatan ini paling tidak memuat lokasi, keluaran langsung dan sumber daya yang diperlukan serta bersifat indikatif.

### 3) Kedudukan dan Fungsi

Renstra SKPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai :

- a) Acuan penyusunan Renja SKPD Provinsi serta Renja SKPD Kabupaten dan Kota.

- b) Rancangan awal Renstra SKPD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RPJM Daerah menjadi Rancangan RPJM Daerah yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam Musrenbang RPJM Daerah.

4) Substansi Renstra SKPD

Materi utama Renstra SKPD memuat visi dan misi SKPD, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan dilengkapi dengan rician kegiatan yang bersifat indikatif berupa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5) Tahapan Penyusunan Renstra SKPD

Dokumen Renstra SKPD disusun melalui rangkaian kegiatan berikut :

- a) Menjabarkan visi, misi, dan program SKPD.
- b) Menyusun program SKPD :
  - Merumuskan visi, misi, dan program SKPD.
  - Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan SKPD.
  - Merumuskan kegiatan indikatif SKPD.

**3. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD)**

Rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Berdasarkan nota kesepakatan, Tim anggaran Pemerintah daerah (TAPD)



menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Hal ini penting, karena proses penyusunan dokumen anggaran setiap tahun dapat berubah-ubah secara teknis dan kebijakan anggaran serta pedoman penyusunan anggaran dari Depdagri harus disosialisasikan kepada seluruh SKPD. Rancangan surat edaran tersebut mencakup beberapa hal berikut:

- 1) PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan (Permendagri No.13 Tahun 2006).  
Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait (Permendagri No. 59 Tahun 2007).
- 2) Sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).
- 3) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).
- 4) Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada Pejabat Pengelolaan keuangan daerah (PPKD).
- 5) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiesi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
- 6) Dokumen sebagai lampiran, meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

#### 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan sebuah instrument pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Kebijakan suatu pemerintah membutuhkan sumber daya berupa alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan system perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan public dalam memahami sistematika perencanaan yang bermuara pada anggaran.

##### a) APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* bahwa Pemerintah Daerah menuangkan penganggaran dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

**b) Struktur APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD ini berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

**1) Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 58 Tahun 2005) yaitu semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.. Pendapatan daerah (Basis Kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan

bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b) Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah, terdiri dari: Hibah, Dana Darurat, Bantuan Dana, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

## **2) Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh



pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja juga dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Belanja Daerah terdiri dari:

- a) Belanja Tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Jenis kelompok belanja tidak langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- b) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis kelompok belanja langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

### **3) Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

#### **a) Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.



## b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

**Tabel 2.1**  
**Struktur APBD Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006,**  
**Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 58 Tahun 2005**

<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....</b>		
<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran xxx/xxx</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Asli Daerah	xxx	
Dana Perimbangan	xxx	
Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	
Total Pendapatan (1) =		xxxx
<b>Belanja</b>		
<b>Belanja Langsung</b>		
Belanja Pegawai	xxx	
Belanja Barang dan Jasa	xxx	
Belanja Modal	xxx	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
Belanja Bunga	xxx	
Belanja Subsidi	xxx	
Belanja Hibah	xxx	
Belanja Sosial	xxx	
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	xxx	
Belanja Tak Terduga	xxx	
Total Belanja (2) =		xxxx
<b>Surplus (Defisit) (3) = (1) – (2)</b>		xxxx
<b>Pembiayaan</b>		
Penerimaan Pembiayaan (4)	xxx	
Pengeluaran Pembiayaan (5)	xxx	
Pembiayaan Netto (6) = (4) – (5)		xxxx
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (7) = (3) + (6)</b>		xxxx

*Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

## 2.4 Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Keuangan Daerah

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (grants) yang ditransfer dari pusat. Indikator

desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara.

Subsidi/transfer dari pusat kepada daerah selama ini melalui tiga jalur :

- 1) Subsidi Daerah Otonom (SDO) atau Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu transfer kepada daerah untuk membiayai pengeluaran rutin.
- 2) Program Inpres atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu untuk membiayai pengeluaran pembangunan sekaligus upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan struktur keuangan antar daerah seperti Inpres Sekolah Dasar, Kesehatan, Pasar, Penghijauan, dan jalan.
- 3) Dana Bagi Hasil merupakan pengembalian dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah seperti gas bumi, perikanan dan lain-lain yang dialokasi untuk dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam mebiayai pembangunan.

## **2.5 Konsep Penerimaan dan Pengeluaran Daerah**

Dalam menjalankan organisasi pemerintahan, Pemerintah Daerah memerlukan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatannya, penerimaan tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

### **2.5.1 Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam tahun tertentu. Menurut Jones (1996) anggaran daerah merupakan rencana kerja

pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Fenomena yang terdapat pada struktur anggaran daerah kabupaten/kota di Indonesia yaitu pada sisi penerimaan terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, hal ini ditunjukkan oleh besarnya proporsi sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Undang-undang No. 34 tahun 2004 menegaskan penerimaan daerah dalam rangka membiayai kegiatan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, yaitu :

#### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam

daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2007 : 96), kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan :



a) Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari : a) Pajak hotel, b) Pajak restoran, c) Pajak hiburan, d) Pajak reklame, e) Pajak penerangan jalan, f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan g) Pajak parkir.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi,

c) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah,
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,



7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
8. Pendapatan denda pajak,
9. Pendapatan denda retribusi,
10. Pendapatan eksekusi atas jaminan,
11. Pendapatan dari pengembalian,
12. Fasilitas sosial dan umum,
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan

dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

Menurut Halim (2007:234), Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, dengan rumus :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2006:191), Efektivitas (hasil guna) adalah suatu keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Efektivitas juga menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang tersusun dalam APBD agar mencapai target yang diharapkan atau bahkan melebihi dari target yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8, 2006, Kinerja adalah hasil keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

### **2.5.2 Pengeluaran Daerah**

Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah, salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif adalah pendistribusian pengeluaran yang merata.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah. Besarnya proporsi tersebut memberikan suatu petunjuk bahwa pembangunan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat terkait dengan anggarannya, akan langsung berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah berjalan melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu melalui dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat kepada daerah. Belanja Daerah, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja terdiri dari :

**1) Belanja Rutin**

Terdiri atas: Administrasi Umum : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Kemudian Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

**2) Belanja Pembangunan**

Terdiri atas: Publik, Aparatur, dan Modal.

**3) Pengeluaran Transfer**

Terdiri atas: Angsuran dan Bunga, Bantuan, Dana Perimbangan, dan Dana Cadangan.

**4) Pengeluaran Tidak Terduga**

## 2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan turunan atau penelitian lanjutan dari apa yang telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti keuangan daerah tentang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Namun, karena keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba mengkaji dengan perbedaan sampel dan daerah serta variabel keuangan daerah lain yang mempengaruhi peningkatan pelaksanaan anggaran keuangan daerah yang lebih baik. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari lahirnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rozani (2000)	Mengkaji pengaruh elastisitas, efisiensi, dan efektifitas PAD terhadap PDRB daerah di Indonesia.	Hasil penerimaan pajak-pajak daerah semestinya harus elastis sepanjang waktu dan tidak berfluktuasi serta signifikan terhadap perkembangan PDRB. Daerah yang memiliki penerimaan PAD tidak elastis terhadap PDRB, memerlukan perbaikan sistem perpajakan daerah guna mendapatkan penerimaan yang memadai.
2	Iskandar (2004)	Mengkaji keterkaitan antara perkembangan Penerimaan Asli Daerah dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi DKI Jakarta.	Berdasarkan hasil analisisnya dapat diketahui bahwa perkembangan PDRB DKI Jakarta teridentifikasi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penerimaan PAD.
3	Insukindro (1994)	Mengkaji peranan dan pengelolaan keuangan daerah dan usaha peningkatan pendapatan asli daerah, dengan melakukan penelitian di beberapa daerah kabupaten/kota.	Berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa peranan PAD terhadap total penerimaan daerah rata-rata sebesar 4 %. Daerah yang pengelolaan keuangan daerah efisien cenderung peningkatan PAD semakin tinggi seperti Kota Padang di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4	Abdullah (2001)	Untuk mengetahui peranan sector public terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.	Penerimaan PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional sedangkan pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin adalah signifikan positif.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan, *descriptive study* dengan pendekatan *case study* secara kuantitatif pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam menganalisis efektifitas belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Penelitian studi deskriptif dengan pendekatan studi kasus Menurut Indriantoro dan Supomo (1999 : 26),

“Merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1999:3) metodologi kuantitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka dan berbagai penjelasan data yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada ketersediaan data dari lembaga tersebut secara holistik (utuh).

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Permendagri No. 58 Tahun 2005 dan No. 13 Tahun 2006 melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) setiap tahunnya melalui unit-unit terkait. Untuk unit analisis dalam penelitian ini digunakan *cross check* di lapangan terhadap beberapa lembaga atau personal yang mengetahui tentang pelaksanaan belanja daerah yang tercantum dalam Perda No. 72 Tahun 2008, yaitu : Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.



## **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **3.2.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan daerah yang mengetahui tentang pelaksanaan anggaran yang berfokus pada efektifitas belanja daerah, yaitu kepala badan/dinas/instansi, kasubag dan staf pada badan/dinas di Pemerintah Kota Padang Panjang-Sumatera Barat.

### **3.2.2. Sampel**

Sampel penelitian ini adalah hanya pejabat yang terkait langsung dengan pengkoordinasi kegiatan yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada 3 (Tiga) dinas/badan yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: Dinas Kesehatan (DKK) Kota Padang, Badan Perencana Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang, dan Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang Panjang.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memberikan informasi yang diperlukan agar mengurangi generalisasi temuan (Sekaran, 2006:137).

### **3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 147). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang berwenang pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang, Badan Perencana Pembangunan Daerah yang dapat memberikan informasi yang penulis perlukan.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Daerah yang terangkum dalam APBD Pemerintah Kota Padang Panjang dan dokumen-dokumen lainnya.

### 3.3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian melalui cara wawancara dengan pihak yang berwenang memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Badan Perencana Pembangunan Kota Padang Panjang dan Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan membahas dan mempelajari buku-buku literatur, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Kemudian peraturan perundang-undangan yang ada seperti PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 13 Tahun 2006, Perda Kota Padang Panjang No. 14 Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 72 Tahun 2008.

### 3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2006:115), variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Oleh karena penelitian ini hanya berbentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, maka variabel

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu bagian saja, yaitu efektifitas pelaksanaan belanja daerah dan indikator penilaian berdasarkan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rincian Kota Padang Panjang Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dan berdasarkan pedoman rumusan, yaitu:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah\ t}{Target\ Belanja\ Daerah\ t} \times 100\%$$

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis persentase sebagaimana dijelaskan oleh, Nasution (1986: 15) yaitu: “Bila suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau menemukan sesuatu sebagaimana adanya tentang suatu objek yang diteliti, maka analisis yang dibutuhkan cukup analisis Persentase(%)”. Dengan tingkat penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Tingkat Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Belanja Daerah

Persentase Penilaian	Kriteria Penilaian
81 – 100%	Sangat Efektif
61 – 80%	Efektif
41 – 61%	Cukup Efektif
21 – 40%	Kurang Efektif
0 – 20%	Tidak Efektif

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang Panjang**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kota Padang Panjang terletak antara  $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 30'$  BT dan  $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 32'$  LS, dengan luas wilayah 2300 Ha atau 0,05% dari luas Propinsi Sumatra Barat.

Posisi geografis Kota Padang Panjang, sebelah Utara, Selatan, dan Barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh.

Kota Padang Panjang hanya terdiri atas dua kecamatan yaitu Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat yang masing-masing kecamatan terdiri atas 8 kelurahan. Gambaran kondisi alam Kota Padang Panjang terdiri dari 18,05% bangunan dan halaman sekitarnya, 30% sawah, 11,31% kebun, 9,26% hutan rakyat, 3,78% kolam, dan 21,56% tidak diusahakan. Topografi daerah sangat bervariasi antara daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 650m sampai dengan 850m dari permukaan laut.

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 sebanyak 52.018 jiwa, terdiri dari 26.098 penduduk laki-laki dan 25.920 penduduk perempuan., dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.262 jiwa/Km<sup>2</sup>.



#### 4.1.2. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan 2000, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2007 tercatat sebesar 6,38%. Pertumbuhan ini cukup menggembirakan dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2006 yang tercatat 6,11%. Pada tahun 2007 secara absolut data PDRB Kota Padang Panjang tercatat sebesar 622,64 milyar rupiah, lebih tinggi dari tahun 2006 yang hanya tercatat sebesar 549,19 atau mengalami kenaikan sebesar 17,29 persen.

Berdasarkan data PDRB Kota Padang Panjang yang tercatat sebesar 622,64 milyar rupiah, maka akan didapat data PDRB perkapita, dimana pada tahun 2007 PDRB perkapita Kota Padang Panjang tercatat sebesar 11,97 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,92 juta rupiah, dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 9,61%. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB terdapat pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha 2005-2007 (jutaan rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2005	2006*	2007**
1	Pertanian	53.172,55	61.204,37	65.049,09
2	Pertambangan dan Penggalian	2.484,72	3.019,23	2466,68
3	Industri Pengolahan	41.674,67	49.426,12	54.724,57
4	Listrik, gas dan air bersih	14.786,50	17.196,08	19.175,18
5	Bangunan	36.919,21	45.817,27	51.789,51
6	Perdagangan, hotel dan restoran	50.070,87	56.279,46	63.912,67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	108.817,90	13.5791,92	146.518,21
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	44.457,62	51.506,74	64.476,17
9	Jasa-jasa	115.839,61	128.948,64	15.4505,09
	PDRB	468.223,65	549.189,83	622.2635,17

Sumber: BPS Kota Padang Panjang

\*) Angka Diperbaiki

\*\*) Angka Sementara

#### **4.1.3 Kondisi Pemerintahan**

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang No.1 tahun 1957 maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September 1957 No. 12/K/DPRD-PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan dengan 16 kelurahan. Dimana masing-masing kecamatan terdiri dari 8 kelurahan.

#### **4.1.4 Kondisi Kesehatan**

Peningkatan pembangunan di Bidang kesehatan selama lima tahun terakhir (2003-2008) telah meletakkan landasan yang kuat bagi peningkatan mutu pelayanan dimasa mendatang. Pada bagian ini akan disampikan secara ringkas kondisi eksisting pembangunan bidang kesehatan pada berbagai aspek.

Dengan telah beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang baru, maka secara bertahap dilakukan peningkatan mutu pelayanan, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditentukan. Untuk menuju pelayanan Rumah Sakit Umum yang berstandar Internasional dengan kekhususan di bidang Respirasi / Pernafasan membutuhkan persiapan yang komrehensif. Baik

dari sisi SDM, sarana prasarana serta pengelolaan manajemen yang handal. Dengan kapasitas tempat tidur awal 95 unit, bangunan fisik yang berkelas hotel serta kondisi geografis dengan pemandangan yang indah, lokasi yang strategis, dan udara yang sejuk sangat mendukung untuk terwujudnya rumah sakit yang menjadi tujuan wisata kesehatan dengan kekhususan dibidang respirasi. Selain itu rumah sakit dengan kekhususan respirasi belum ada di wilayah Sumatera sehingga diharapkan dapat menjadi pusat rujukan Respirasi se Sumatera. Sedangkan dibidang SDM, pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis akan dipenuhi nantinya melalui kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan dan Rumah Sakit lainnya.

Di bidang peningkatan mutu pelayanan, pada akhir tahun 2007 telah dilaksanakan proses persiapan untuk penilaian Akreditasi 5 Pelayanan Dasar; (Pelayanan UGD, Pelayanan medis, pelayanan keperawatan, Administrasi Manajemen, Rekam medik ). Untuk proses persiapan dan penilaian dibutuhkan waktu selama 2 tahun, sehingga ditargetkan pada awal tahun 2010 RSUD sudah lulus penilaian untuk akreditasi 5 dasar. Sedangkan tahun 2013 akan dilanjutkan dengan penilaian Akreditasi 12 Pelayanan Dasar ( Pelayanan Farmasi, Keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana-K3, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Pengendalian Infeksi dan Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi).

Salah satu bukti peningkatan mutu pelayanan adalah angka kunjungan. Dimana kecenderungan angka kunjungan pasien yang berasal dari luar kota Padang Panjang cukup tinggi. Hampir 40 % kunjungan pasien ke RSUD berasal dari luar kota Padang Panjang, dimana sejak beroperasinya Rumah Sakit Baru

Tahun 2007 terjadi peningkatan angka kunjungan dari 16.739 orang menjadi 20.155 orang ( meningkat 20 % ). Hal ini membuktikan bahwa mutu pelayanan di RSUD sudah dianggap baik. Seperti data berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Kunjungan Pasien Dalam dan Luar Kota di**  
**RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2007**

Tahun	Dalam Kota	Luar Kota	Jumlah
2004	15.437	12.630	28.067
2005	21.549	17.774	39.323
2006	23.114	16.739	39.853
2007	23.660	20.155	43.815

Sumber: RSUD Kota Padang Panjang

Sedangkan peningkatan Angka Kujungan Pasien ke Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Kunjungan Pasien di Puskesmas**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2007**

Tahun	Jumlah
2004	45.132
2005	44.978
2006	39.307
2007	49.723

Sumber: DKK Kota Padang Panjang

Untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan diperlukan sistim informasi rumah Sakit. Sistem Informasi Rumah Sakit masih dilakukan secara manual, sehingga banyak kendala yang timbul dalam hal pencatatan, penyimpanan, pelaporan dan evaluasi. Hal ini juga berakibat jumlah waktu dan SDM yang diperlukan lebih banyak serta biaya operasional tinggi. Untuk itu kedepan sangat dibutuhkan suatu teknologi ICT yang handal yang mampu menyimpan dan mengolah data secara on line di seluruh bagian dalam bentuk SIM-RS.



Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara umum di Kota Padang Panjang, baik di Puskesmas maupun RSUD, tidak terlepas dari dukungan SDM yang handal, untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan bagi SDM kesehatan. Jumlah pelatihan dan pendidikan pegawai selama 3 tahun terakhir (2006-2008) secara rata-rata sekitar 10 jam/org/thn. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI ( 36 jam/orang/tahun ) masih jauh dari yang ditentukan. Gambaran mengenai jumlah pelatihan SDM karyawan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Jam Pelatihan SDM**

Tahun	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah petugas	Rata-Rata /Jam/tahun
2006	2.894	216	13,39 jam
2007	2.638	262	10,06 jam
2008	2.419	295	8,2 jam

Sumber: RSUD Kota Padang Panjang

Selain dari pendidikan dan pelatihan petugas, juga diperlukan adanya Standar Pelayanan Kesehatan baik di RSUD maupun Puskesmas, mengingat standar pelayanan merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu penyusunan Standar Pelayanan harus segera direalisasikan sebagai salah satu aspek legal dalam pemberian pelayanan.

Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kota Padang Panjang juga tidak terlepas dari kondisi peralatan pendukung. Dilihat dari kondisi peralatan di RSUD masih tergolong belum lengkap untuk mencapai target akreditasi 12 Pelayanan dan kekhususan di bidang Pernafasan (Respirasi) serta Puskesmas Paripurna. Rumah Sakit sebagai Pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang memerlukan kelengkapan peralatan kedokteran dan kesehatan yang menunjang pencapaian visi dan misi, yaitu Rumah Sakit sebagai



tujuan wisata kesehatan dengan kekhususan di bidang respirasi yang islami dan berstandar internasional . Sementara kondisi peralatan untuk mencapai tujuan tersebut di atas masih tergolong kurang, seperti kondisi umum peralatan \_pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Peralatan Medis di RSUD Kota Padang Panjang yang Mendukung Pencapaian Tujuan Akreditasi & Pusat Rujukan Respirasi**

Tahun	Jenis Peralatan	% Ketersediaan Peralatan Kesehatan
2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phaco Emulsifikasi</li> <li>- Slit Lamp</li> <li>- Auto Keratometer</li> <li>- EKG</li> <li>- Endoscopy ( OAE Test )</li> <li>- Defibrilator</li> <li>- X-Ray Panoramic</li> <li>- USG</li> <li>- Syringe Pump</li> <li>- Injection Pump</li> </ul>	38 %
2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phaco Emulsifikasi</li> <li>- Slit Lamp</li> <li>- Auto Keratometer</li> <li>- EKG</li> <li>- Endoscopy ( OAE Test )</li> <li>- Defibrilator</li> <li>- X-Ray Panoramic</li> <li>- USG</li> <li>- Syringe Pump</li> <li>- Injection Pump</li> <li>- Sleep Apnoe Diagnostic</li> <li>- Yag Laser</li> <li>- Skin Laser</li> <li>-Micro Dermabration with Therapi Oksigen</li> <li>- LHE (Light Heat Therapy)</li> <li>- Ventilator</li> </ul>	40 %

Sumber: RSUD Kota Padang Panjang

Selain dari permasalahan di atas, kondisi persediaan obat yang ada di Apotik Pelengkap RSUD masih belum maksimal. Hal ini diakibatkan karena seringnya perubahan daftar obat yang diminta oleh Dokter Spesialis, sehingga banyak obat jenis baru yang diminta tidak dapat langsung disediakan mengingat

stock obat sisa jenis yang lama masih banyak dengan kondisi 40 % pada tahun 2007. Hal ini harus segera di atasi untuk dapat mewujudkan mutu pelayanan paripurna, sehingga pasien yang membutuhkan obat dapat segera dilayani secara penuh di Rumah Sakit .

Salah satu indikator peningkatan mutu pelayanan adalah melalui peningkatan angka perbaikan gizi masyarakat dan cakupan pelayanan ksehatan serta penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil di Kota Padang Panjang seperti terlihat pada tabel 2.29 dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Realisasi Pencapaian Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan**  
**Di Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008**

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1	Perbaikan gizi masyarakat	65,07%	75,69%	79,52%	84,17%..	86,4%
2	Ratio Kematian Bayi	3/751	9/845	12/873	8/918	3/1252
3	Ratio Kematian Ibu Hamil	2/751	2/845	0	0	0
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan	54,74%	64,70%	78,70%	83,30%	85,3%

Sumber: DKK Kota Padang Panjang

Dengan peningkatan yang diharapkan pada tahun 2013 mencapai 100 %. Dimana diharapkan seluruh masyarakat dapat terlayani 100 %. Hal ini juga didukung dengan semakin lengkapnya sarana kesehatan yang sudah merata di 2 (dua) kecamatan, yaitu dengan jumlah Puskesmas sebanyak 3 unit, Puskesmas Pembantu 7 unit, dan Posyandu sebanyak 90 unit. Dengan kelengkapan sarana kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan serta berimbas pada umur harapan hidup masyarakat yang juga meningkat Tahun 2004 angka harapan hidup penduduk Kota Padang Panjang sudah mencapai 69,6 tahun, sedikit di bawah pencapaian kota Bukittinggi dan Sawahlunto (BPS, 2005) sedangkan pada tahun 2007 angka

harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang mencapai 69,8 tahun dan diharapkan tahun 2013 dapat mencapai 71,2 tahun.

#### **4.2 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang**

Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan sebagai alat untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan maka pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Artinya pendapatan daerah yang ditargetkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja daerah yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang Panjang tahun 2003-2007, baik dari aspek Pendapatan, aspek Belanja maupun Aspek Pembiayaan Daerah. Berikut ini akan dikemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan struktur APBD Tahun Anggaran 2003-2007, baik itu pengelolaan Pendapatan Daerah, pengelolaan Belanja Daerah maupun pengelolaan Pembiayaan Daerah yang masing-masingnya dirinci kedalam target dan realisasi sebagai berikut :

##### **1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Secara umum Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang

menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Untuk PAD, jenisnya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan, jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak;
- c. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, demikian juga untuk periode tahun 2003-2007. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Daerah periode tahun 2003-2007 adalah Rp. 755.411.585.920 dengan realisasi sebesar Rp. 772.264.263.795,77 (102,50%)

Gambaran target dan realisasi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2003-2007 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.7**  
**Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang**  
**Periode 2003 – 2007**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2003	105.263.153.296	107.946.356.303,94	102,55
2	2004	112.383.252.922	117.527.669.755	104,57
3	2005	126.750.618.702	130.201.369.534,67	102,72
4	2006	188.785.434.000	190.400.483.888,44	100,86
5	2007	222.229.127.000	226.188.384.313,72	101,78
<b>Jumlah</b>		<b>755.411.585.920</b>	<b>772.264.263.795,77</b>	<b>102,50</b>

Sumber : LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2003-2008

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang cenderung meningkat dari tahun 2003 hingga tahun 2007, dengan capaian rata-rata di atas 100% per tahun atau capaiannya di atas target yang direncanakan.

Selanjutnya disampaikan gambaran perkembangan PAD Kota Padang Panjang periode tahun 2003-2007 yang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi rencana maupun dari sisi realisasi. Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaiannya rata-rata di atas 100%. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2003-2007 adalah Rp. 34.642.230.157 dengan realisasi sebesar Rp. 41.479.265.423,49 (120,33 %). Adapun rincian rencana dan realisasi PAD Kota Padang Panjang tahun 2003-2007, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.8**  
**Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Padang Panjang Periode 2003 – 2007**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2003	5.105.315.854	6.056.335.427,94	118,63
2	2004	5.935.214.101	8.334.177.143,47	140,42
3	2005	7.047.488.202	7.220.422.891,67	102,45
4	2006	7.736.676.000	9.349.808.568,66	120,85
5	2007	8.817.536.000	10.518.521.391,75	119,29
<b>Jumlah</b>		<b>34.642.230.157</b>	<b>41.479.265.423,49</b>	<b>120,33</b>

Sumber : LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2003-2008



Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah memang berasal dari Dana Perimbangan yang nota benenya berasal dari Pemerintah Pusat. Total rencana Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari Dana Perimbangan ini selama periode tahun 2003-2007 adalah sebesar Rp. 717.251.289.763 dengan realisasi mencapai Rp. 721.663.461.206,31 (100,82%). Adapun rincian rencana dan realisasi dari penerimaan yang berasal dari dana perimbangan tahun 2003-2007 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**Rencana dan Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan**  
**Kota Padang Panjang Periode 2003 – 2007**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2003	100.157.837.442	101.890.020.876	101,73
2	2004	106.448.038.821	109.193.492.611,53	102,57
3	2005	119.703.130.500	119.007.353.837	99,42
4	2006	181.084.758.000	181.050.675.319,78	100,01
5	2007	209.857.525.000	210.521.918.562	100,32
<b>Jumlah</b>		<b>717.251.289.763</b>	<b>721.663.461.206,31</b>	<b>100,82</b>

*Sumber : LKPJ AMJ Walikota Padang Panjang Tahun 2003-2008*

Selanjutnya dari komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dikemukakan bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2007 jenis Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, hanya ada pada struktur pendapatan pada Tahun Anggaran 2007, sedangkan untuk tahun 2003-2006 Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan satu kesatuan atau dikelompokkan pada kelompok Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. Dengan demikian jelas total rencana Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, selama periode tahun 2003-2007

hanya ada pada tahun 2007, yakni direncanakan sebesar Rp. 3.554.066.000 dengan realisasi mencapai Rp. 5.147.944.359,97 (144,85%).

## **2. Pengelolaan Belanja Daerah.**

Secara konseptual Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Secara garis besar Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa seiring dengan kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun, maka juga diikuti adanya kecenderungan peningkatan pada struktur belanja daerah. Kecenderungan peningkatan ini tentunya sejalan pula dengan perkembangan program, kegiatan dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan total rencana Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2003-2007 adalah Rp. 853.104.822.714,12 dengan realisasi sebesar Rp. 694.006.099.469,52 (81,35%) Adapun gambaran umum perkembangan rencana dan realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang periode Tahun Anggaran 2003-2007 seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.10**  
**Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang**  
**Periode 2003-2007**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2003	113.314.913.018	94.077.210.903,44	83,02
2	2004	133.949.914.607,56	110.197.752.711,98	82,26
3	2005	153.741.314.822.	127.338.555.374,10	82,83
4	2006	202.928.600.000	170.959.550.893.	84,25
5	2007	249.170.080.266,56	191.433.029.587	76,83
<b>Jumlah</b>		<b>853.104.822.714,12</b>	<b>694.006.099.469,52</b>	<b>81,35</b>

*Sumber : LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2003-2008*

Dari tabel di atas terlihat bahwa seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun 2003 hingga 2007, maka rencana Belanja Daerah juga cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Peningkatan tersebut baik pada sisi rencana maupun pada sisi realisasi. Namun demikian realisasi Belanja Daerah dari tahun 2003 hingga 2007 rata-rata di bawah 90,%. Artinya dari aspek ekonomis hal ini setidaknya mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam pengelolaan Belanja Daerah.

### 3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Secara umum Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2003-2007 pada dasarnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan umumnya

digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Adapun gambaran target dan realisasi dari Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2003-2007, baik itu aspek Penerimaan maupun aspek Pengeluaran Pembiayaan Daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.11**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang**  
**Periode 2003-2007**

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan			Pengeluaran Pembiayaan		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2003	19.334.859.175,56	19.279.288.891,27	99,71	11.483.811.453,56	1.535.150.000	0,01
2	2004	31.608.481.091,06	31.311.496.162,06	99,06	10.783.438.405,5	38.641.413.205,08	358,34
3	2005	36.671.203.505,26	36.671.203.505,26	100	9.680.507.385,26	3.765.315.658	38,90
4	2006	31.831.818.995,83	31.831.818.995,83	100	14.750.000.000	2.977.312.941,71	20,19
5	2007	48.421.837.266,58	48.421.837.266,58	100	21.480.884.000	18.165.384.000	84,56

Sumber : LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2003-2008

### 4.3 Arah Pembangunan Kota Padang Panjang

#### 4.3.1 Visi

Visi dan misi Kota Padang Panjang jangka menengah adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya Masyarakat Kota Padang Panjang yang Maju, Makmur, dan Islami"***

Visi jangka menengah tersebut merupakan penjabaran dari visi Kota Padang Panjang dalam jangka panjang, yaitu: **"Kota yang Maju, Lestari, dan Islami"**

Penjabaran dari **visi jangka menengah**, yaitu :

*"Masyarakat Padang Panjang yang **Maju** adalah masyarakat yang cerdas, sehat, inovatif, tangguh dan berdaya saing, Masyarakat Padang Panjang yang **Makmur** adalah masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan pemerataan hasil pembangunan, kondisi ekonomi masyarakat yang tangguh, peningkatan angka harapan hidup, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, Kehidupan yang **Islami** adalah setiap aspek kehidupan (pemerintahan dan kemasyarakatan) yang dilandasi dengan norma-norma islami"*



#### 4.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kota Padang Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan;
2. Mewujudkan pusat pelayanan kesehatan berstandar internasional;
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan pusat pelayanan kesehatan berstandar internasional sehingga memiliki tujuan, sasaran, dan program kegiatan dibidang kesehatan sebagai bentuk pelayanan masyarakat.

#### 4.3.3 Tujuan

Misi mewujudkan pusat pelayanan kesehatan berstandar internasional bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan wisata kesehatan,
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat,
- 3) Meningkatkan angka harapan hidup di Kota Padang Panjang.

#### 4.3.4 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya rumah sakit umum dengan 12 standar pelayanan terakreditasi,



- 2) Meningkatnya kunjungan pasien dari luar Kota Padang Panjang 32.980 orang tahun 2013,
- 3) Terselenggaranya pengelolaan rumah sakit yang berbasis ICT, dengan indikator Beroperasinya SIM Rumah Sakit di seluruh instalasi di RSUD Kota Padang Panjang,
- 4) Penetapan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan Puskesmas,
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :
  - a. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan jumlah jam pelatihan karyawan menjadi 36 jam/org/thn,
  - b. Peningkatan peralatan kedokteran/kesehatan,
  - c. menjamin ketersediaan obat NON-DPHO untuk seluruh penyakit yang bisa ditangani oleh dokter RSUD Kota Padang Panjang.
- 6) Cakupan pelayanan kesehatan 98%,
- 7) Angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang menjadi 71,2 tahun.

#### **4.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan diperlukan untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan pembangunan untuk misi **Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Berstandar Internasional** adalah :

1. *Perwujudan kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pelayanan kesehatan;*
2. *Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;*
3. *Peningkatan angka harapan hidup di Kota Padang Panjang.*

#### **4.3.6 Arah Kebijakan Anggaran Pengelolaan Belanja Daerah**

Memperhatikan kondisi umum pendapatan daerah tahun 2003-2007, maka beberapa kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2008-2013 diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang kewenangan sebagaimana telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang antara lain sebagai berikut :

- 1) Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, berimplikasi terhadap pelaksanaannya, dimana diperlukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga adanya beberapa kali keterlambatan dalam penetapan APBD.
- 2) Relatif masih terbatasnya anggaran yang disediakan untuk membiayai Belanja Daerah, sebagai akibat dari keterbatasan pendapatan daerah, antara lain dirasakan keterbatasan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak dari kondisi ini antara lain ada kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau dibiayai sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan.
- 3) Masih perlunya optimalisasi dukungan teknis administratif dalam pengelolaan Belanja Daerah, sehingga prinsip-prinsip anggaran seperti transparansi pengelolaan Akuntabilitas, Disiplin, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas dalam penggunaan Belanja Daerah dapat dilaksanakan seutuhnya.

- 4) Masih perlunya peningkatan optimalisasi dan konsistensi dalam mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian anggaran belanja daerah, sehingga upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dapat ditingkatkan.

Memahami hal tersebut maka kebijakan umum belanja diarahkan pada upaya antara lain :

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana semaksimal mungkin diusahakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.
- b. Mengingat berbagai keterbatasan dalam Belanja Daerah, maka kebijakannya diprioritaskan pula untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.
- c. Belanja Daerah disusun semaksimal mungkin dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- d. Belanja Daerah diarahkan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan Belanja Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam pengelolaan belanja tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD seperti : Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Berdasarkan kondisi tersebut, belanja daerah pada periode 2008-2013 diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, diarahkan agar lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional terhadap belanja langsung (urusan wajib dan urusan pilihan);
2. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja yang merupakan konsekuensi logis dari adanya penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 30% dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), 70% dari realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Industri, dan 70% dari realisasi Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Air Bawah Tanah (ABT);
3. Belanja Bantuan yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan Provinsi dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan dengan menggunakan pendekatan potensi dan kebutuhan daerah, wilayah, jumlah dan sebaran penduduk dengan kriteria tingkat PDRB per kapita Kota;
4. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam



rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah diarahkan penggunaannya secara proporsional, tepat guna dan akuntabel;

5. Belanja Langsung Urusan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan prioritas : a) Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Relevansi Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha; b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat; c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Berbasis Masyarakat; d) Restrukturisasi, Refungsionalisasi dan Revitalisasi Lembaga-Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan pembangunan ekonomi serta perkuatan Ekonomi Masyarakat; e) Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan UKM yang bergerak di bidang usaha kerajinan, makanan ringan, hotel dan restoran; f) Pemberdayaan BKM dan LPM pada setiap kelurahan; Pengembangan lembaga keuangan mikro/koperasi pada setiap kelurahan; Pengembangan industri berbasis lokalita seperti kulit, kapur, bunga hias dan sayur-sayuran; g) Membuka peluang usaha bagi setiap kelurahan mengembangkan sentra ekonomi dan produk yang spesifik. Implementasi belanja daerah pada prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan sektor lainnya;
6. Meningkatkan dana cadangan pemerintah agar dapat mempekecil kesenjangan fiskal daerah;
7. Meningkatkan disiplin anggaran dengan menghindarkan setiap bentuk pembelanjaan yang tidak dianggarkan pada tahun anggaran berjalan, kecuali



belanja yang disebabkan keadaan darurat sesuai ketentuan perundang-undangan dan dicantumkan dalam perhitungan anggaran.

8. Disiplin dalam penjadwalan anggaran untuk mendukung efektivitas penganggaran pendapatan bagi hasil dan bantuan yang diberikan pada Kecamatan;
9. Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar.

#### **4.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif**

Salah satu Indikator dalam pencapaian Misi Mewujudkan Kota Sehat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 adalah mewujudkan Peraturan Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Dalam kaitan dengan pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan telah dilakukan pula berbagai kegiatan antara lain seperti : Penetapan Keputusan Pembangunan Fisik Sarana Kesehatan (RSU yang baru) telah dilakukan oleh Dinas PU Kota Padang Panjang sesuai dengan RUTK, Penetapan Keputusan WaliKota Padang Panjang tentang kegiatan Bangun Praja dan kota Bersih, dan Pembangunan fasilitas kesehatan di kawasan yang sejuk dan nyaman.

Pada Tahun 2004 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 diproyeksikan cakupan pelayanan kesehatan 54,74% dengan realisasi sebesar 61,41%. Selanjutnya pada Tahun 2005 angka cakupan pelayanan kesehatan dapat direalisasikan diatas angka proyeksi

yang ditetapkan, dimana angka proyeksi ditetapkan sebesar 59,48% dengan realisasi 64,70%. Angka realisasi cakupan pelayanan ini terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada Tahun 2006 cakupan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang mencapai 78,70%, hal ini jauh melebihi proyeksi target yakni hanya 64,22% (naik 14,48% dari angka proyeksi target). Keberhasilan ini dapat dicapai antara lain karena adanya perbaikan pelayanan setelah penerapan Penerapan Buku Manual Praktis Peningkatan Pelayanan Publik yang difasilitasi MENPAN & GTZ Jerman, penerapan Asuransi kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JPKM-PP) yang telah dimulai semenjak bulan Agustus 2006 dan dikembangkan Program JPKM-PP dengan sistem Dokter Keluarga. Sebagai kelanjutan dari tahun 2006 maka untuk tahun 2007 cakupan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang baik di puskesmas ataupun RSUD mencapai 83,30% dari target sebesar 68,96% atau ada peningkatan cakupan pelayanan sebesar 14,34%

Selanjutnya jika dilihat dari standar pelayanan minimal bidang kesehatan, ternyata angka capaian kinerja indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang untuk Tahun 2007 cukup menggembirakan, karena angka capaiannya di atas standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dimana untuk propinsi sebesar 72,0% dan SPM untuk nasional sebesar 65,0%. Sarana dan prasarana kesehatan dapat di lihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 4.12**  
**Data Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	3
3	Puskesmas Pembantu	7
4	Klinik Pengobatan	0
5	Puskesmas Keliling	3
6	Praktek Dokter	34
7	Praktek Bidan	30
8	Pos Kesehatan Kelurahan	16
9	Posyandu Balita	90
10	Posyandu Lansia	32
11	Poskestren	3
12	Apotik	7
13	Rumah obat berizin	6
14	Batra dengan izin praktek	6
	<b>Total</b>	<b>239</b>

*Sumber : Kasi RAS dan Kespem dan Kasi UKBM DKK P.Panjang*

#### **4.5 Program Pembangunan Daerah**

Pemerintah daerah perlu secara cermat membaca aspirasi yang berkembang, kemudian merespon dan mengakomodasikannya dalam agenda pemerintah daerah serta menuangkan kedalam arah kebijakan serta program pembangunan. Program Pembangunan Daerah Tahun 2008–2013 pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu (a) menekan angka kemiskinan dan pengangguran, (b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta (d) meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Guna menjabarkan prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang perlu dilaksanakan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Program pembangunan untuk misi **Mewujudkan Pelayanan Kesehatan berstandar internasional** adalah :

1) *Program Perwujudan Padang Panjang sebagai kota tujuan wisata kesehatan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan daerah lainnya, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :*

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit,
- b. Penetapan standar pelayanan kesehatan di RSUD Kota Padang Panjang,
- c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (SIM RS).

2) *Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :*

- a. Penetapan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas,
- b. Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan,
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan,
- d. Peningkatan persediaan obat Esensial dan Non Formularium,
- e. Pembinaan dan pengawasan jejaring pelayanan kesehatan,
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan puskesmas terhadap masyarakat.

3) *Program Peningkatan angka harapan hidup di Kota Padang Panjang, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :*

- a. Pelaksanaan PHBS,
- b. Antisipasi dan penanggulangan KLB ,
- c. Optimalisasi pelaksanaan Kota Sehat,
- d. Pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,
- e. Upaya perbaikan gizi masyarakat,



- f. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak,
- g. Posyandu lansia.

#### 4.6 Analisis Data dan Pembahasan

##### 4.6.1 Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2010

Analisis pertama dilakukan untuk mengetahui penilaian efektifitas belanja daerah dinas kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2010 yang bertujuan mendorong Pemerintah daerah untuk dapat mengefektifkan belanja daerah sehingga tidak menimbulkan mark up yang berakibat pada pelayanan masyarakat.


Penilaian efektifitas belanja daerah merupakan penilaian terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dinilai dengan pedoman rumusan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } t}{\text{Target Belanja Daerah } t} \times 100\%$$

Dan menurut program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan Visi Dinas kesehatan, sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan



- 
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan alat tulis kantor
  - g. Penyediaan alat cetakan dan penggandaan
  - h. Penyediaan komponen alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - i. Penyediaan makanan dan minuman
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - k. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
  - l. Penyediaan jasa medis
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
  - d. DAK bidang kesehatan
  - e. Penunjang operasional DAK
3. Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- c. Penyusunan pelaporan prognosis relisasi anggaran
  - d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
- a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
  - b. Revitalisasi sistem kesehatan
  - c. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
  - d. Peningkatan kesehatan masyarakat
  - e. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
  - f. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
  - g. Usaha kesehatan sekolah
7. Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan:
- a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
  - b. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
8. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan:
- a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
  - b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
  - c. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
  - d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

e. Pembentukan/pelatihan desa siaga

9. Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan:

- a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- b. Sosialisasi penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKI), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

10. Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan:

- a. Forum kota sehat
- b. Penyuluhan lingkungan sehat

11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan kegiatan:

- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- d. Peningkatan Surveillance Epidemlogidan penanggulangan wabah
- e. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

12. Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:

- a. Penyusunan standar kesehatan

13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan kegiatan:

- a. Imunisasi bagi anak balita
- b. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan kegiatan:

- a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

15. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan kegiatan:

- a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu
- b. Pemetaan ibu hamil dan resiko tinggi

16. Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan, dengan kegiatan:

- a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Hasil pengolahan data untuk penilaian efektifitas belanja daerah dapat disajikan pada tabel-tabel berikut:



**Tabel 4.13**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.385.000	2.304.000	96,6	Sangat Efektif
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	118.200.000	79.111.207	66,93	Efektif
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	316.606.000	202.114.832	63,84	Efektif
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.450.000	113.190.000	89,51	Sangat Efektif
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.325.000	11.070.000	83,06	Sangat Efektif
6	Penyediaan alat tulis kantor	67.277.000	54.864.654	81,55	Sangat Efektif
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.888.000	42.855.369	95,47	Sangat Efektif
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.163.800	4.084.000	66,26	Efektif
9	Penyediaan makanan dan minuman	33.415.000	25.026.500	74,90	Efektif
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	118.000.000	90.952.600	77,08	Efektif
11	Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	175.320.000	164.015.000	93,55	Sangat Efektif
12	Penyediaan jasa media	155.000.000	138.019.500	89,04	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>1.177.029.800</b>	<b>927.607.662</b>	<b>78,81</b>	<b>Efektif</b>

Dari tabel 4.13 diketahui penilaian atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 78,81%.

**Tabel 4.14**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	43.450.000	42.722.500	98,33	Sangat Efektif
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.500.000	78.933.400	94,53	Sangat Efektif
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	38.323.000	17.474.300	45,60	Cukup Efektif
4	DAK bidang kesehatan	2.452.120.000	2.319.820.791	94,6	Sangat Efektif
5	Penunjang operasional DAK	178.268.000	173.634.995	97,4	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>2.795.661.000</b>	<b>2.632.585.986</b>	<b>94,17</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.14 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 94,17%.

**Tabel 4.15**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56.500.000	56.050.000	99,2	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>56.500.000</b>	<b>56.050.000</b>	<b>99,20</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.15 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Disiplin Aparatur untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 99,20%.

**Tabel 4.16**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	49.898.000	35.546.500	71,24	Efektif
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	26.000.000	9.400.000	36,15	Kurang Efektif
	<b>Total</b>	<b>75.898.000</b>	<b>44.946.500</b>	<b>59,22</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Dari tabel 4.16 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 59,22%.

**Tabel 4.17**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**  
**Kinerja dan Keuangan**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	244.000	242.000	99,18	Sangat Efektif
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	352.000	349.250	99,22	Sangat Efektif
3	Penyusunan pelaporan prognosis relisasi anggaran	244.000	243.500	99,80	Sangat Efektif
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	389.000	382.800	98,41	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.217.550</b>	<b>99,07</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.17 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 99,07%.

**Tabel 4.18**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	40.585.000	27.630.000	68,08	Efektif
2	Revitalisasi sistem kesehatan	55.886.000	52.554.400	94,04	Sangat Efektif
3	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	13.867.000	9.544.600	68,83	Efektif
4	Peningkatan kesehatan masyarakat	106.007.000	95.684.500	90,24	Sangat Efektif
5	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	50.822.000	21.906.000	43,10	Cukup Efektif
6	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	2.719.680.000	2.630.000	96,73	Sangat Efektif
7	Usaha kesehatan sekolah	117.655.000	93.095.250	79,13	Efektif
	<b>Total</b>	<b>3.104.502.000</b>	<b>2.931.024.750</b>	<b>94,41</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.18 diketahui penilaian atas Program Upaya Kesehatan Masyarakat untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 94,41%.

**Tabel 4.19**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Pengawasan Obat dan Makanan**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	33.038.000	27.142.000	82,15	Sangat Efektif
2	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	13.416.000	5.925.000	44,16	Cukup Efektif
	<b>Total</b>	<b>46.454.000</b>	<b>33.067.000</b>	<b>71,18</b>	<b>Efektif</b>

Dari tabel 4.19 diketahui penilaian atas Program Pengawasan Obat dan Makanan untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 71,18%.



**Tabel 4.20**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	47.445.000	40.015.000	84,34	Sangat Efektif
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	46.776.000	39.159.500	83,73	Sangat Efektif
3	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	43.246.000	25.389.850	58,71	Cukup Efektif
4	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100.605.000	48.831.250	48,54	Cukup Efektif
5	Pembentukan/pelatihan desa siaga	42.895.000	39.339.500	91,71	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>280.957.000</b>	<b>192.735.100</b>	<b>68,60</b>	<b>Efektif</b>

Dari tabel 4.20 diketahui penilaian atas Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 68,60%.

**Tabel 4.21**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	193.220.000	189.114.350	97,88	Sangat Efektif
2	Sosialisasi penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	23.960.000	20.624.850	86,08	Sangat Efektif
3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	45.728.000	35.940.600	78,60	Efektif
	<b>Total</b>	<b>262.908.000</b>	<b>245.679.800</b>	<b>93,45</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.21 diketahui penilaian atas Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 93,45%.

**Tabel 4.22**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Forum kota sehat	44.350.000	40.101.675	90,42	Sangat Efektif
2	Penyuluhan lingkungan sehat	37.002.000	30.289.300	81,86	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>81.352.000</b>	<b>70.390.075</b>	<b>86,53</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.22 diketahui penilaian atas Program Pengembangan Lingkungan Sehat untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 86,53%.

**Tabel 4.23**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Pencegahan Penyakit Menular**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	75.528.000	54.197.500	71,76	Efektif
2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	101.290.000	66.668.500	65,82	Efektif
3	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	102.768.000	88.613.000	86,23	Sangat Efektif
4	Peningkatan surveilliance epidemiologi dan penanggulangan wabah	98.495.000	82.834.000	84,10	Sangat Efektif
5	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	73.445.000	64.502.500	87,82	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>451.526.000</b>	<b>356.815.500</b>	<b>79,02</b>	<b>Efektif</b>

Dari tabel 4.23 diketahui penilaian atas Program Pencegahan Penyakit Menular untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 79,02%.

**Tabel 4.24**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Standarisasi Pelayan Kesehatan**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Penyusunan standar kesehatan	29.624.000	0	0	
	<b>Total</b>	<b>29.624.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Dari tabel 4.24 diketahui penilaian atas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan tidak efektif karena target anggaran untuk program ini telah dianggarkan tetapi tidak direalisasikan, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 0%.

**Tabel 4.25**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen tase (%)	Kriteria Penilaian
1	Imunisasi bagi anak balita	348.605.000	308.115.000	88.39	Sangat Efektif
2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	25.469.000	23.333.200	91,61	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>374.074.000</b>	<b>331.448.200</b>	<b>88,60</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.25 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak dan Balita untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan Sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 88,60%.

**Tabel 4.26**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	162.882.000	145.858.200	89,55	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>162.882.000</b>	<b>145.858.200</b>	<b>89,55</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.26 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan Sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 89,55%.

**Tabel 4.27**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	41.053.000	40.196.500	97,91	Sangat Efektif
2	Pemetaan ibu hamil dan penjangkaran ibu hamil resiko tinggi	20.538.000	19.103.500	93,02	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>61.591.000</b>	<b>59.300.000</b>	<b>96,28</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.27 diketahui penilaian atas Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan Sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 96,28%.



**Tabel 4.28**  
**Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Menurut**  
**Program Penataan Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan**  
**Pemanfaatan Tanah**

No	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	75.000.000	73.500.000	98,00	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>75.000.000</b>	<b>73.500.000</b>	<b>98,00</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel 4.28 diketahui penilaian atas Program Penataan Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk menentukan efektifitas belanja daerah dikategorikan Sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari total persentase yang diperoleh yaitu 98,00%.

Kesimpulan dari tabel-tabel diatas untuk penilaian efektifitas belanja daerah pada masing-masing program dapat disimpulkan pada tabel dibawah ini yang merupakan gambaran besar penilaiannya sehingga didapat hasil penilaian, yaitu:

**Tabel 4.29**  
**Hasil Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2010 berdasarkan Program**  
**Pembangunan**

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.177.029.800	927.607.662	78,81	Efektif
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.795.661.000	2.632.585.986	94,17	Sangat Efektif
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	56.500.000	56.050.000	99,20	Sangat Efektif
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.898.000	44.946.500	59,22	Cukup Efektif
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.229.000	1.217.550	99,07	Sangat Efektif
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	3.104.502.000	2.931.024.750	94,41	Sangat Efektif
7	Pengawasan Obat dan Makanan	46.454.000	33.067.000	71,18	Efektif
8	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	280.957.000	192.735.100	68,60	Efektif
9	Perbaikan Gizi Masyarakat	262.908.000	245.679.800	93,45	Sangat Efektif
10	Pengembangan Lingkungan Sehat	81.352.000	70.390.075	86,53	Sangat Efektif
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	451.526.000	356.815.500	79,02	Efektif
12	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	29.624.000	0	0	Tidak Efektif
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	374.074.000	331.448.200	88,60	Sangat Efektif
14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	162.882.000	145.858.200	89,55	Sangat Efektif
15	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	61.591.000	59.300.000	96,28	Sangat Efektif
16	Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	75.000.000	73.500.000	98,00	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>9.037.187.800</b>	<b>8.102.227.223</b>	<b>89,65</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari hasil penilaian pada masing-masing Program penilaian efektifitas belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, diperoleh total rata-rata persentase dengan hasil relative sangat Baik, total keseluruhan nilai kumulatif

persentase dari hasil penilaian efektifitas belanja daerah yaitu 89,65%. Itu artinya efektifitas belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dapat dikatakan Baik karena telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan masyarakat dengan relative sangat baik sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan sudah dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan keinginan masyarakat.

#### **4.6.2 Perbandingan Penilaian Efektifitas Belanja Daerah Pada Dinas Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010**

Analisis kedua dilakukan untuk mengetahui perbandingan penilaian efektifitas belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2009 dan Tahun 2010 bertujuan untuk mencerminkan pencapaian yang diharapkan dari proses pelaksanaan anggaran daerah yang focus penelitian pada efektifitas belanja daerah. Hasil pengolahan data tentang perbandingan penilaian efektifitas belanja daerah Tahun 2009 dan tahun 2010 dapat disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.30

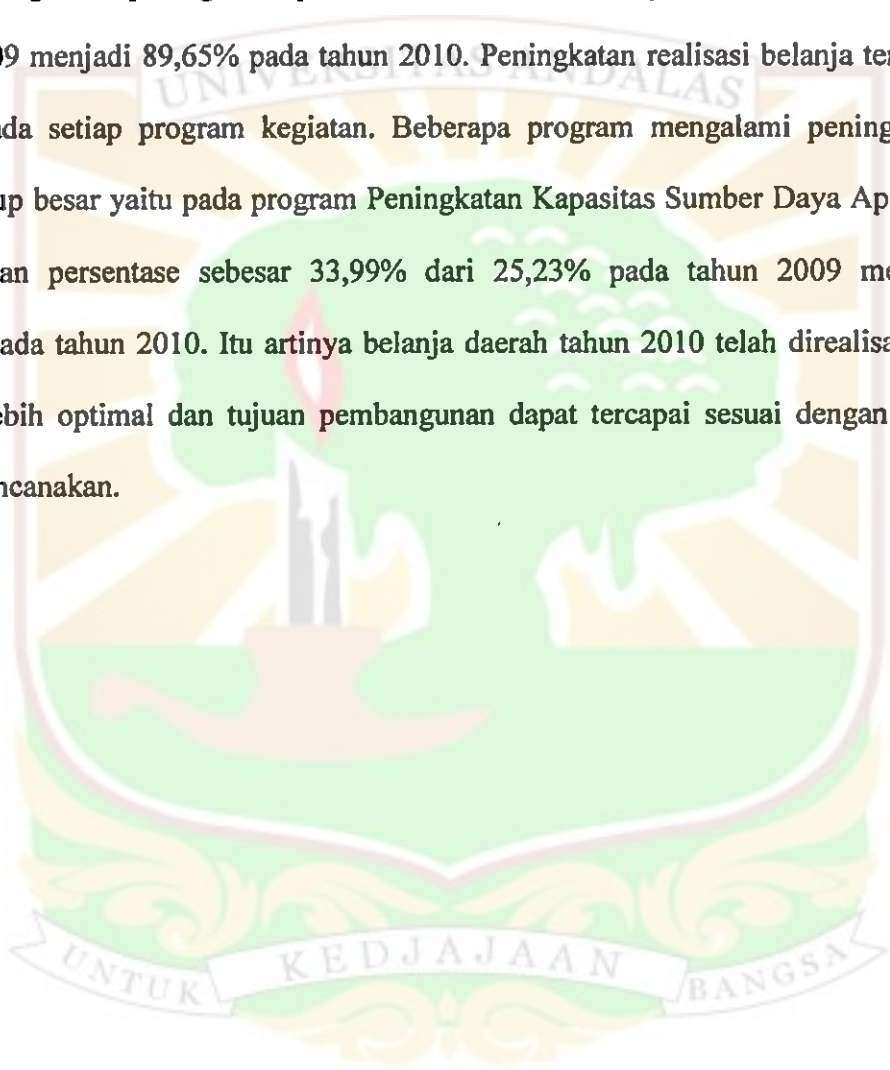
## Perbandingan Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Tahun Anggaran 2009 - 2010 .

No	Program	Tahun 2009			Tahun 2010		
		Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.294.935.000	856.743.526	66,16	1.177.029.800	927.607.662	78,81
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.280.911.000	8.365.240.117	90,13	2.795.661.000	2.632.585.986	94,17
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	51.050.000	47.750.000	93,54	56.500.000	56.050.000	99,20
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83.007.000	20.945.000	25,23	75.898.000	44.946.500	59,22
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	919.000	718.000	78,13	1.229.000	1.217.550	99,07
7	Upaya Kesehatan Masyarakat	5.633.018.000	3.731.510.981	66,24	3.104.502.000	2.931.024.750	94,41
8	Pengawasan Obat dan Makanan	39.872.000	30.779.500	77,20	46.454.000	33.067.000	71,18
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	266.045.000	167.721.150	63,04	280.957.000	192.735.100	68,60
10	Perbaikan Gizi Masyarakat	261.701.000	238.191.450	91,02	262.908.000	245.679.800	93,45
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	59.083.000	49.437.475	83,00	81.352.000	70.390.075	86,53
12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	288.897.000	223.109.500	77,23	451.526.000	356.815.500	79,02
14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	310.788.000	253.620.750	81,61	374.074.000	331.448.200	88,60
15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	130.169.000	92.380.500	70,97	162.882.000	145.858.200	89,55
16	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	44.239.000	41.896.000	94,70	61.591.000	59.300.000	96,28



Dari table 4.30 diatas dapat dilihat Realisasi belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2010 lebih efektif dibanding realisasi belanja Tahun anggaran 2009. Pada tahun anggaran 2010 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan persentase sebesar 10,12% yaitu dari 79,53% pada tahun 2009 menjadi 89,65% pada tahun 2010. Peningkatan realisasi belanja tersebut terjadi pada setiap program kegiatan. Beberapa program mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan persentase sebesar 33,99% dari 25,23% pada tahun 2009 menjadi 59,22% pada tahun 2010. Itu artinya belanja daerah tahun 2010 telah direalisasikan dengan lebih optimal dan tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penilaian terhadap efektifitas belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk Tahun anggaran 2010 dapat dikatakan sudah tercapai dengan sangat efektif dengan perolehan tingkat persentase 89,65%. Ini menunjukkan bahwa efektifitas belanja daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga telah mencapai tujuan pembangunan dan dapat dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan keinginan masyarakat, didukung oleh program-program yang mendapatkan hasil persentase yang relative baik dan efektif seperti berikut:

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran sudah mencapai 78,81%
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sudah mencapai 94,17%
- c) Peningkatan Disiplin Aparatur sudah mencapai 99,20%
- d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sudah mencapai 59,22%
- e) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sudah mencapai 99,07%
- f) Upaya Kesehatan Masyarakat sudah mencapai 94,41%
- g) Pengawasan Obat dan Makanan sudah mencapai 71,18%
- h) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah mencapai 68,60%
- i) Perbaikan Gizi Masyarakat sudah mencapai 93,45%
- j) Pengembangan Lingkungan Sehat sudah mencapai 86,53%
- k) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sudah mencapai 79,02%

- l) Standarisasi Pelayanan Kesehatan sudah mencapai 0%
- m) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita sudah mencapai 88,60%
- n) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia sudah mencapai 89,55%
- o) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak sudah mencapai 96,28%
- p) Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sudah mencapai 98,00%

Secara keseluruhan perbandingan realisasi belanja daerah terhadap target belanja yang sudah dianggarkan untuk setiap program pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah diatas 80% dengan kriteria penilaian sangat efektif.

- 2) Realisasi belanja daerah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2010 lebih efektif dibanding realisasi belanja Tahun anggaran 2009. Pada tahun anggaran 2010 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan persentase sebesar 10,12% yaitu dari 79,53% pada tahun 2009 menjadi 89,65% pada tahun 2010.

## 5.2 Implikasi dan Saran

Secara keseluruhan penelitian ini mengungkapkan hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, yaitu masalah efektifitas belanja daerah Rencana kerja yang terdapat dalam RPJMD dan rincian kegiatan yang ada pada Rencana Strategis Dinas hendaklah dapat direalisasikan seoptimal mungkin. Dilihat dari analisa data, pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk program Standarisasi Pelayanan Kesehatan tidak ada realisasi. Itu artinya belanja daerah yang ditargetkan untuk program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dapat dikategorikan tidak efektif. Dengan demikian Pemerintah Daerah hendaknya perlu meninjau kembali apakah program tersebut benar-benar

dibutuhkan dan dapat direalisasikan. Oleh karena itu disarankan agar pihak-pihak yang berwenang bisa menempatkan orang yang benar-benar berkompeten dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran. Disamping disarankan juga agar penempatannya disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2008. *Padang Panjang dalam Angka 2008*. Padang Panjang: BPS Kota Padang Panjang dan Bappeda Kota Padang Panjang.
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, Dr. MBA., AK., 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rozani, 2000. *Pengaruh elastisitas, efisiensi, dan efektifitas PAD terhadap PDRB daerah di Indonesia*.
- Iskandar, 2004. *Keterkaitan antara perkembangan Penerimaan Asli Daerah dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi DKI Jakarta*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Pemerintah Kota Padang Panjang, 2007. *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang, 2009. *Peraturan Daerah Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013.*

Pemerintah Kota Padang Panjang, 2008. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013.*



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang panjang dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**

1. Penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
2. Penyediaan sistem informasi kesehatan
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
4. Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
5. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja

**B. Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan :**

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan.
2. Penyediaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan.
3. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat

**C. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan:**

1. Peningkatan disiplin aparatur
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur
3. Penerapan *Reward* dan *Punishment* bagi aparatur
4. Penerapan sistem renumerasi

**D. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan:**

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan
3. Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan secara merata bagi sarana pelayanan kesehatan.

**E. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:**

1. Penyediaan formulasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.

3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD dan Rumah Sakit binaan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
4. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.
5. Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
6. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan lansia
7. Revitalisasi Sistem Kesehatan Dasar dan Rujukan.
8. Peningkatan kemampuan tanggap darurat bencana.

**F. Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Penyediaan media promosi dan informasi kesehatan
2. Penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat
3. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan
4. Pengembangan Kelurahan Siaga

**G. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

1. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM)
2. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB
3. Pengembangan tatanan kota sehat.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (A P B D) RINCIAN KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**  
**BULAN : DESEMBER 2009**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UU DP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	608.000.000				544.093.800	36.974.200	581.068.000	26.932.000	
1 02 1 02 01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	608.000.000				544.093.800	36.974.200	581.068.000	26.932.000	
1 02 1 02 01 00 00 4 1 1	Hasil Retribusi Daerah	608.000.000				544.093.800	36.974.200	581.068.000	26.932.000	
1 02 1 02 01 00 00 4 1 1 1	Retribusi Jasa Umum	608.000.000				544.093.800	36.974.200	581.068.000	26.932.000	
1 02 1 02 01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	608.000.000				544.093.800	36.974.200	581.068.000	26.932.000	
1 02 1 02	BELANJA TIDAK LANGSUNG dan BELANJA LANGSUNG	23.652.787.000	14.630.855.618	5.047.311.928	19.678.167.546	14.288.901.252	5.263.928.978	19.552.830.230	4.573.119.454	125.337.316
1 02 1 02 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	23.652.787.000	14.630.855.618	5.047.311.928	19.678.167.546	14.288.901.252	5.263.928.978	19.552.830.230	4.573.119.454	125.337.316
1 02 1 02 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.414.436.000	4.657.344.675	390.819.770	5.048.164.445	4.657.169.675	390.819.770	5.047.989.445	366.271.555	175.000
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	5.414.436.000	4.657.344.675	390.819.770	5.048.164.445	4.657.169.675	390.819.770	5.047.989.445	366.271.555	175.000
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji dan Tunjangan	4.517.936.000	3.906.769.675	331.294.770	4.238.064.445	3.906.769.675	331.294.770	4.238.064.445	279.871.555	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS	3.313.857.000	2.868.401.100	241.790.900	3.110.192.000	2.868.401.100	241.790.900	3.110.192.000	203.665.000	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	295.336.000	258.869.858	22.053.584	280.923.442	258.869.858	22.053.584	280.923.442	14.412.558	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	229.645.000	194.580.000	16.845.000	211.425.000	194.580.000	16.845.000	211.425.000	18.220.000	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	280.963.000	267.577.497	23.302.500	290.879.997	267.577.497	23.302.500	290.879.997	(9.916.997)	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	92.300.000	75.335.000	5.475.000	80.810.000	75.335.000	5.475.000	80.810.000	11.490.000	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	208.291.000	162.369.900	15.051.960	177.421.860	162.369.900	15.051.960	177.421.860	30.869.140	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.439.000	79.554.597	6.769.025	86.323.622	79.554.597	6.769.025	86.323.622	11.115.378	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	105.000	81.723	6.801	88.524	81.723	6.801	88.524	16.476	
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan PNS	896.500.000	750.575.000	59.525.000	810.100.000	750.400.000	59.525.000	809.925.000	86.400.000	175.000
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	896.500.000	750.575.000	59.525.000	810.100.000	750.400.000	59.525.000	809.925.000	86.400.000	175.000
1 02 1 02 01	BELANJA LANGSUNG	18.238.351.000	9.973.510.943	4.656.492.158	14.630.003.101	9.631.731.577	4.873.109.208	14.504.840.785	4.206.847.899	125.162.316
	UANG PERSEDIAAN		600.000.000		600.000.000					600.000.000
1 02 1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.294.935.000	554.129.158	80.475.334	634.604.492	634.603.992	222.139.534	856.743.526	660.330.508	(222.139.034)
1 02 1 02 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.667.000	1.643.300	616.500	2.259.800	2.259.800	42.500	2.302.300	407.200	(42.500)
1 02 1 02 01 01 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.667.000	1.643.300	616.500	2.259.800	2.259.800	42.500	2.302.300	407.200	(42.500)
1 02 1 02 01 01 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	2.667.000	1.643.300	616.500	2.259.800	2.259.800	42.500	2.302.300	407.200	(42.500)
1 02 1 02 01 01 01 5 2 2 01 04	Belanja perangkat, material, dan benda pos lainnya	2.667.000	1.643.300	616.500	2.259.800	2.259.800	42.500	2.302.300	407.200	(42.500)
1 02 1 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.584.000	45.352.438	5.251.534	50.603.972	50.603.972	8.750.984	59.354.956	69.980.028	(8.750.984)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.584.000	45.352.438	5.251.534	50.603.972	50.603.972	8.750.984	59.354.956	69.980.028	(8.750.984)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03	Belanja jasa kantor	120.584.000	45.352.438	5.251.534	50.603.972	50.603.972	8.750.984	59.354.956	69.980.028	(8.750.984)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 01	Belanja telepon	22.500.000	13.184.395	1.434.319	14.618.714	14.618.714	2.407.164	17.025.878	7.881.286	(2.407.164)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UUDP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 02	Belanja Air	13.764.000	2.282.400	333.500	2.615.900	2.615.900	468.500	3.084.400	10.648.100	(468.500)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	72.020.000	23.463.875	2.655.215	26.119.590	26.119.590	4.219.320	30.338.910	46.700.410	(4.219.320)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 06	Belanja kawat/laksmi/Internet	12.000.000	6.421.768	828.000	7.249.768	7.249.768	1.656.000	8.905.768	4.750.232	(1.656.000)
1 02 1 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	357.692.000	170.212.545	37.416.000	207.628.545	207.628.545	7.038.000	214.666.545	150.063.455	(7.038.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	357.692.000	170.212.545	37.416.000	207.628.545	207.628.545	7.038.000	214.666.545	150.063.455	(7.038.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	357.692.000	170.212.545	37.416.000	207.628.545	207.628.545	7.038.000	214.666.545	150.063.455	(7.038.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	11.650.000	4.977.000	423.000	5.400.000	5.400.000	258.000	5.658.000	8.250.000	(258.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	142.750.000	54.193.545	13.682.500	67.876.045	67.876.045	1.438.000	69.314.045	74.871.955	(1.438.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	188.032.000	109.876.000	23.260.500	133.136.500	133.136.500	4.830.000	137.966.500	54.895.500	(4.830.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR	1.560.000	-	-	-	-	-	-	1.560.000	-
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	11.700.000	1.166.000	50.000	1.216.000	1.216.000	517.000	1.733.000	10.484.000	(517.000)
1 02 1 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	121.700.000	81.635.000	-	81.635.000	81.635.000	33.025.000	114.660.000	40.065.000	(33.025.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	121.700.000	81.635.000	-	81.635.000	81.635.000	33.025.000	114.660.000	40.065.000	(33.025.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 01	Honorarium PNS	118.450.000	80.725.000	-	80.725.000	80.725.000	32.625.000	113.350.000	37.725.000	(32.625.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.450.000	80.725.000	-	80.725.000	80.725.000	32.625.000	113.350.000	37.725.000	(32.625.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 03	Uang Lembur	3.250.000	910.000	-	910.000	910.000	400.000	1.310.000	2.340.000	(400.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	3.250.000	910.000	-	910.000	910.000	400.000	1.310.000	2.340.000	(400.000)
1 02 1 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.991.000	7.258.100	-	7.258.100	7.258.100	948.500	8.206.600	3.732.900	(948.500)
1 02 1 02 01 01 08 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.991.000	7.258.100	-	7.258.100	7.258.100	948.500	8.206.600	3.732.900	(948.500)
1 02 1 02 01 01 08 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	10.991.000	7.258.100	-	7.258.100	7.258.100	948.500	8.206.600	3.732.900	(948.500)
1 02 1 02 01 01 08 5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.991.000	7.258.100	-	7.258.100	7.258.100	948.500	8.206.600	3.732.900	(948.500)
1 02 1 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	69.914.000	39.761.450	5.921.400	45.682.850	45.682.850	5.902.100	51.584.950	24.231.150	(5.902.100)
1 02 1 02 01 01 10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.914.000	39.761.450	5.921.400	45.682.850	45.682.850	5.902.100	51.584.950	24.231.150	(5.902.100)
1 02 1 02 01 01 10 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	69.914.000	39.761.450	5.921.400	45.682.850	45.682.850	5.902.100	51.584.950	24.231.150	(5.902.100)
1 02 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	69.914.000	39.761.450	5.921.400	45.682.850	45.682.850	5.902.100	51.584.950	24.231.150	(5.902.100)
1 02 1 02 01 01 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	39.581.000	21.360.825	8.649.900	30.010.725	30.010.725	3.391.250	33.401.975	9.570.275	(3.391.250)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.581.000	21.360.825	8.649.900	30.010.725	30.010.725	3.391.250	33.401.975	9.570.275	(3.391.250)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	39.581.000	21.360.825	8.649.900	30.010.725	30.010.725	3.391.250	33.401.975	9.570.275	(3.391.250)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2 06 01	Belanja cetak	18.843.000	10.545.000	4.987.500	15.532.500	15.532.500	-	15.532.500	3.310.500	-
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	20.738.000	10.815.825	3.662.400	14.478.225	14.478.225	3.391.250	17.869.475	6.259.775	(3.391.250)
1 02 1 02 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.626.000	2.565.000	-	2.565.000	2.564.500	600.000	3.164.500	3.061.000	(599.500)
1 02 1 02 01 01 12 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.626.000	2.565.000	-	2.565.000	2.564.500	600.000	3.164.500	3.061.000	(599.500)
1 02 1 02 01 01 12 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	5.626.000	2.565.000	-	2.565.000	2.564.500	600.000	3.164.500	3.061.000	(599.500)
1 02 1 02 01 01 12 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	5.626.000	2.565.000	-	2.565.000	2.564.500	600.000	3.164.500	3.061.000	(599.500)
1 02 1 02 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.500.000	-	-	-	-	647.500	647.500	13.500.000	(647.500)
1 02 1 02 01 01 15 5 2 3	BELANJA MODAL	13.500.000	-	-	-	-	647.500	647.500	13.500.000	(647.500)
1 02 1 02 01 01 15 5 2 3 27	Belanja modal Pengadaan Buku/Perpustakaan	13.500.000	-	-	-	-	647.500	647.500	13.500.000	(647.500)
1 02 1 02 01 01 15 5 2 3 27 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	13.500.000	-	-	-	-	647.500	647.500	13.500.000	(647.500)
1 02 1 02 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	45.920.000	15.093.500	150.000	15.243.500	15.243.500	4.493.500	19.737.000	30.676.500	(4.493.500)
1 02 1 02 01 01 17 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.920.000	15.093.500	150.000	15.243.500	15.243.500	4.493.500	19.737.000	30.676.500	(4.493.500)
1 02 1 02 01 01 17 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	45.920.000	15.093.500	150.000	15.243.500	15.243.500	4.493.500	19.737.000	30.676.500	(4.493.500)
1 02 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.920.000	15.093.500	150.000	15.243.500	15.243.500	4.493.500	19.737.000	30.676.500	(4.493.500)
1 02 1 02 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000	47.352.000	13.690.000	61.042.000	61.042.000	2.505.000	63.547.000	38.958.000	(2.505.000)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	47.352.000	13.690.000	61.042.000	61.042.000	2.505.000	63.547.000	38.958.000	(2.505.000)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas	100.000.000	47.352.000	13.690.000	61.042.000	61.042.000	2.505.000	63.547.000	38.958.000	(2.505.000)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000	16.160.000	2.540.000	18.700.000	18.700.000	2.505.000	21.205.000	21.300.000	(2.505.000)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000	31.192.000	11.150.000	42.342.000	42.342.000	-	42.342.000	17.658.000	-



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGARAN		SP2D		REALISASI		SP2		ANGARAN	
		1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3+6)
				S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN INI	UMP
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	176.760.000	121.695.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	139.455.000	46.085.000	8.780.000
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1	BELAJA PEGAWAI	176.760.000	121.695.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	139.455.000	46.085.000	8.780.000
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1 02	Honorarium Non PIS	176.760.000	121.695.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	139.455.000	46.085.000	8.780.000
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai honoror/diak tetap	176.760.000	121.695.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	130.675.000	8.780.000	139.455.000	46.085.000	8.780.000
1 02 1 02 01 01 20 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	230.000.000	230.000.000	-	-	-	-	146.015.200	146.015.200	(146.015.200)	230.000.000
1 02 1 02 01 01 20 5 2 2 03	Belanja jasa kantor	230.000.000	230.000.000	-	-	-	-	146.015.200	146.015.200	(146.015.200)	230.000.000
1 02 1 02 01 01 20 5 2 2 03 12	Belanja jasa medis	230.000.000	230.000.000	-	-	-	-	146.015.200	146.015.200	(146.015.200)	230.000.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2	BELAJA PEGAWAI	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1	Urah	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01	Urah Pektorya	7.000.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.725.000	3.900.000	7.000.000	3.100.000
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 1 06 01											

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN				REALISASI				SISA			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	ANGGARAN	UDUD	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	21.750.000			21.090.000	9.610.000	21.090.000	9.610.000	21.090.000	9.610.000	21.090.000	660.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 12 11	Belanja modal pengadaan software	10.000.000			9.610.000		9.610.000		9.610.000		9.610.000	390.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 01	Belanja modal pengadaan meubelair	89.650.000			291.940.000	291.940.000	291.940.000	291.940.000	291.940.000	291.940.000	8.600.000	8.600.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 02	Belanja modal pengadaan meja kerja	18.750.000			29.670.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000	3.980.000	3.980.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 03	Belanja modal pengadaan kursi kerja	24.000.000			15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	3.000.000	3.000.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi rapat	14.400.000			22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	2.000.000	2.000.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 05	Belanja modal pengadaan sofa	17.500.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.500.000	2.500.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 06	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	15.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.400.000	2.400.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	205.000.000			14.920.000	14.920.000	14.920.000	14.920.000	14.920.000	14.920.000	80.000	80.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 08	Belanja modal pengadaan handycam	30.000.000			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.000.000	5.000.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 09	Belanja modal pengadaan proyektor	50.000.000			43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	6.300.000	6.300.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 10	Belanja modal pengadaan soundsystem dan lighting	75.000.000			72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	2.500.000	2.500.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.990.000.000			43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	7.000.000	7.000.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	2.940.000.000			131.250.000	131.250.000	131.250.000	131.250.000	131.250.000	131.250.000	105.611.200	105.611.200	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 13	Belanja modal pengadaan kontrus/pembelian gedung kantor	3.865.000.000			49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	300.000	300.000	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 14	Belanja modal pengadaan kontrus/pembelian gedung kantor	2.233.515.050			1.046.984.650	1.046.984.650	1.046.984.650	1.046.984.650	1.046.984.650	1.046.984.650	504.500.300	504.500.300	
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 13 15	Belanja modal pengadaan kontrus/pembelian gedung kantor	2.165.000.000			1.320.476.650	1.320.476.650	1.320.476.650	1.320.476.650	1.320.476.650	1.320.476.650	168.228.300	168.228.300	
1 02 1 02 01 02 47	Pembiayaan Operasional DAK	208.920.000			95.962.867	95.962.867	95.962.867	95.962.867	95.962.867	95.962.867	16.315.133	16.315.133	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1	BEKUTJA PEGAWAI	9.675.000			8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	9.675.000	9.675.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.675.000			8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	9.675.000	9.675.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan	5.800.000			5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1 01 02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	3.875.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.875.000	3.875.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2	BEKUTJA BARANG DAN JASA	199.245.000			192.604.867	192.604.867	192.604.867	192.604.867	192.604.867	192.604.867	6.640.133	6.640.133	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	70.000	70.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 02	Belanja jasa konsultan	13.000.000			6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.150.133	6.150.133	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 03	Belanja jasa pengumuman kelang/pemegang kelang	13.000.000			6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.099.867	6.150.133	6.150.133	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 04	Belanja jasa konsultan	4.375.000			4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 05	Belanja jasa konsultan perencanaan	179.000.000			82.688.000	82.688.000	82.688.000	82.688.000	82.688.000	82.688.000	178.580.000	178.580.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 06	Belanja jasa konsultan pengawasan	97.500.000			82.688.000	82.688.000	82.688.000	82.688.000	82.688.000	82.688.000	178.580.000	178.580.000	
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 07	Belanja jasa konsultan	81.500.000			81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	200.000	200.000	
1 02 1 02 01 03 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.400.000			47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	
1 02 1 02 01 03 02 5 2 1	Pengadaan pakikan dinas beserta perengkapannya	50.350.000			47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	2.950.000	2.950.000	
1 02 1 02 01 03 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1 02 1 02 01 03 02 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2	BEKUTJA BARANG DAN JASA	50.100.000			47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	2.700.000	2.700.000	
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2 12	Belanja pakikan dinas dan atributnya	50.100.000			47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	2.700.000	2.700.000	
1 02 1 02 01 03 03 03	Pengadaan pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2	BEKUTJA BARANG DAN JASA	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 01	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 02	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 03	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 04	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 05	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 06	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 07	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 08	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 09	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 10	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 11	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 12	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 13	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 14	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 15	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 16	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 17	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 18	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 19	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 20	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 21	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 22	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 23	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 24	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1 02 1 02 01 03 03 5 2 2 13 25	Belanja pakikan kerja lapangan	700.000			700.000	700.00							



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGARAN	REALISASI				SISWA
			SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8
1 02 1 02 01 05 02	Sosialisasi peraturan pertanggung-undangan	37.007.000	5.325.000	5.325.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
1 02 1 02 01 05 02 1	BELANJA PEGAWAI	25.775.000	4.350.000	4.350.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1	Honorarium PNS	22.735.000	4.350.000	4.350.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19.900.000	4.350.000	4.350.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01	Honorarium untuk pengantar transportasi	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.835.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000					
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 0							

KODE REKENING		URAIAN		JUMLAH ANGGARAN		REALISASI		SISA	
1		2		3		SP2D		SISA	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1		BELANJA BARANG DAN JASA		470.646.000		359.031.336		111.614.664	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 01		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 02		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 03		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 04		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 05		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 06		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 07		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 08		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 09		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 10		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 11		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 12		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 13		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 14		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 15		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 16		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 17		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 18		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 19		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 20		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 21		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 22		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 23		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 24		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 25		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 26		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 27		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 28		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 29		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 30		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 31		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 32		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 33		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 34		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 35		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 36		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 37		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 38		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 39		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 40		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 41		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 42		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 43		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 44		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 45		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 46		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 47		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 48		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 49		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 50		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 51		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 52		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 53		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 54		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 55		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 56		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 57		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 58		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 59		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 60		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 61		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 62		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 63		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 64		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 65		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 66		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 67		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 68		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 69		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 70		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 71		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 72		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 73		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 74		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 75		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 76		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 77		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 78		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 79		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 80		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 81		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 82		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 83		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 84		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 85		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 86		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 87		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 88		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 89		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 90		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 91		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 92		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 93		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 94		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 95		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 96		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 97		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 98		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1 99		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 00		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 01		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 02		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 03		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 04		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 05		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 06		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 07		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 08		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 09		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 10		Belanja alat tulis kantor		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 11		Belanja bahan habis pakai		107.792.300		109.054.000		252.669.036	
1 02 1 02 01 15 01 5 2 2 12		Belanja alat tulis kantor		107.					



[illegible]





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SSA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	SPJ BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UUDP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.072.000	2.769.500	-	2.769.500	2.769.500	2.250.000	5.019.500	2.252.500	(2.250.000)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	84.000	82.000	-	82.000	82.000	-	82.000	2.000	-
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	84.000	82.000	-	82.000	82.000	-	82.000	2.000	-
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 02	Belanja bahan material	4.500.000	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000	2.250.000	4.500.000	2.250.000	(2.250.000)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000	2.250.000	4.500.000	2.250.000	(2.250.000)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	438.000	437.500	-	437.500	437.500	-	437.500	500	-
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	438.000	437.500	-	437.500	437.500	-	437.500	500	-
1 02 1 02 01 17 04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	7.475.000	4.925.500	2.549.500	7.475.000	7.475.000	-	7.475.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000	3.500.000	1.750.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.250.000	3.500.000	1.750.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5.250.000	3.500.000	1.750.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.225.000	1.425.500	799.500	2.225.000	2.225.000	-	2.225.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	175.000	175.000	-	175.000	175.000	-	175.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	175.000	175.000	-	175.000	175.000	-	175.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	2.050.000	1.250.500	799.500	2.050.000	2.050.000	-	2.050.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000	1.250.500	799.500	2.050.000	2.050.000	-	2.050.000	-	-
1 02 1 02 01 19 01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	266.045.000	112.189.150	30.715.500	142.904.650	142.904.650	124.816.500	167.721.150	123.140.350	(24.816.500)
1 02 1 02 01 19 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	23.382.000	18.400.000	-	18.400.000	18.400.000	3.000.000	21.400.000	4.982.000	(3.000.000)
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.740.000	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.740.000	(3.000.000)
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	440.000	-	-	-	-	-	-	440.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	340.000	-	-	-	-	-	-	340.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.300.000	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.300.000	(3.000.000)
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Non PNS	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	(3.000.000)
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.642.000	18.400.000	-	18.400.000	18.400.000	-	18.400.000	1.242.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	4.448.000	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	448.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	48.000	-	-	-	-	-	-	48.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 01 10	Belanja dekorasi	4.400.000	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	400.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	15.044.000	14.400.000	-	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	644.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 06 01	Belanja cetak	15.000.000	14.400.000	-	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	600.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	44.000	-	-	-	-	-	-	44.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 19 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	84.520.000	47.763.000	16.609.000	64.372.000	64.372.000	5.250.000	69.622.000	20.148.000	(5.250.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	46.975.000	17.830.000	10.547.500	28.377.500	28.377.500	5.250.000	33.627.500	18.597.500	(5.250.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.700.000	10.520.000	5.332.500	15.852.500	15.852.500	4.550.000	20.402.500	17.847.500	(4.550.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.100.000	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	400.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	6.800.000	4.760.000	1.360.000	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000	680.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	24.800.000	4.060.000	3.972.500	8.032.500	8.032.500	4.550.000	12.582.500	16.767.500	(4.550.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	13.275.000	7.310.000	5.215.000	12.525.000	12.525.000	700.000	13.225.000	750.000	(700.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	13.275.000	7.310.000	5.215.000	12.525.000	12.525.000	700.000	13.225.000	750.000	(700.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.545.000	29.933.000	6.061.500	35.994.500	35.994.500	-	35.994.500	1.550.500	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	23.820.000	21.724.000	1.292.000	23.016.000	23.016.000	-	23.016.000	804.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.420.000	1.824.000	1.292.000	3.116.000	3.116.000	-	3.116.000	304.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01 10	Belanja dekorasi	20.250.000	19.900.000	-	19.900.000	19.900.000	-	19.900.000	350.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	2.450.000	1.382.500	997.500	2.380.000	2.380.000	-	2.380.000	70.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	2.450.000	1.382.500	997.500	2.380.000	2.380.000	-	2.380.000	70.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	11.275.000	6.826.500	3.772.000	10.598.500	10.598.500	-	10.598.500	676.500	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.275.000	6.826.500	3.772.000	10.598.500	10.598.500	-	10.598.500	676.500	-

[illegible]



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	SPJ	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UUDP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
102.01.02.01.20.01.01	Persiapan Perbaikan Gizi Masyarakat	261.901.000	115.900.550	106.891.300	122.791.850	139.541.850	98.649.600	238.191.450	261.901.000	12.709.550
1 02 1 02 01 20 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	29.695.000	7.855.900	6.217.900	14.073.800	14.073.800	1.900.000	15.973.800	15.621.200	(1.900.000)
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.675.000	5.377.500	4.060.000	9.437.500	9.437.500	1.900.000	11.337.500	12.237.500	(1.900.000)
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	19.125.000	5.377.500	3.560.000	8.937.500	8.937.500	700.000	9.637.500	10.187.500	(700.000)
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4.400.000	2.200.000	2.200.000	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	-	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	9.800.000	2.040.000	1.360.000	3.400.000	3.400.000	-	3.400.000	6.400.000	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	4.925.000	1.137.500	-	1.137.500	1.137.500	700.000	1.837.500	3.787.500	(700.000)
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.550.000	-	500.000	500.000	500.000	1.200.000	1.700.000	2.050.000	(1.200.000)
1 02 1 02 01 20 01 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	2.550.000	-	500.000	500.000	500.000	1.200.000	1.700.000	2.050.000	(1.200.000)
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.020.000	2.478.400	2.157.900	4.636.300	4.636.300	-	4.636.300	3.381.700	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.112.000	288.400	439.400	727.800	727.800	-	727.800	384.200	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.112.000	288.400	439.400	727.800	727.800	-	727.800	384.200	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	2.275.000	960.000	682.500	1.642.500	1.642.500	-	1.642.500	632.500	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	2.275.000	960.000	682.500	1.642.500	1.642.500	-	1.642.500	632.500	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	4.633.000	1.230.000	1.036.000	2.266.000	2.266.000	-	2.266.000	2.367.000	-
1 02 1 02 01 20 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.633.000	1.230.000	1.036.000	2.266.000	2.266.000	-	2.266.000	2.367.000	-
1 02 1 02 01 20 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	100.468.000	93.236.850	96.838.400	190.075.250	106.825.250	88.450.000	195.275.250	10.392.750	(5.200.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	22.345.000	7.865.000	8.895.000	16.760.000	16.760.000	3.560.000	20.320.000	5.585.000	(3.560.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.845.000	5.240.000	5.820.000	11.060.000	11.060.000	2.260.000	13.320.000	2.785.000	(2.260.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7.200.000	3.200.000	3.100.000	6.300.000	6.300.000	900.000	7.200.000	900.000	(900.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01 02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	525.000	-	-	-	-	-	-	525.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	6.120.000	2.040.000	2.720.000	4.760.000	4.760.000	1.360.000	6.120.000	1.360.000	(1.360.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	8.500.000	2.625.000	3.075.000	5.700.000	5.700.000	1.300.000	7.000.000	2.800.000	(1.300.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	8.500.000	2.625.000	3.075.000	5.700.000	5.700.000	1.300.000	7.000.000	2.800.000	(1.300.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.123.000	85.371.850	87.943.400	173.315.250	90.065.250	84.890.000	174.955.250	4.807.750	(1.640.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	3.516.000	1.042.600	498.400	2.341.000	2.341.000	-	2.341.000	1.175.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.036.000	1.602.600	378.400	1.981.000	1.981.000	-	1.981.000	1.055.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	480.000	240.000	120.000	360.000	360.000	-	360.000	120.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 02	Belanja bahan material	163.000.000	78.647.250	83.250.000	161.897.250	78.647.250	83.250.000	161.897.250	1.102.750	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	163.000.000	78.647.250	83.250.000	161.897.250	78.647.250	83.250.000	161.897.250	1.102.750	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	3.325.000	1.950.000	935.000	2.885.000	2.885.000	-	2.885.000	440.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	3.325.000	1.950.000	935.000	2.885.000	2.885.000	-	2.885.000	440.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	8.282.000	2.932.000	3.260.000	6.192.000	6.192.000	1.640.000	7.832.000	2.090.000	(1.640.000)
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.282.000	2.932.000	3.260.000	6.192.000	6.192.000	1.640.000	7.832.000	2.090.000	(1.640.000)
1 02 1 02 01 20 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	31.538.800	14.807.800	3.835.000	18.642.800	18.642.800	8.299.600	26.942.400	12.895.200	(8.299.600)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	25.930.000	9.682.500	3.835.000	13.517.500	13.517.500	8.162.500	21.680.000	12.462.500	(8.162.500)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.875.000	9.682.500	1.277.500	10.960.000	10.960.000	1.977.500	12.937.500	3.915.000	(1.977.500)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.000.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	1.500.000	-
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-	-
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	6.475.000	2.782.500	1.277.500	4.060.000	4.060.000	1.977.500	6.037.500	2.415.000	(1.977.500)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	11.105.000	-	2.557.500	2.557.500	2.557.500	6.185.000	8.742.500	8.547.500	(6.185.000)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	11.105.000	-	2.557.500	2.557.500	2.557.500	6.185.000	8.742.500	8.547.500	(6.185.000)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.558.000	5.125.300	-	5.125.300	5.125.300	137.100	5.262.400	432.700	(137.100)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.723.000	1.395.800	-	1.395.800	1.395.800	107.100	1.502.900	327.200	(107.100)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.723.000	1.395.800	-	1.395.800	1.395.800	107.100	1.502.900	327.200	(107.100)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	350.000	244.500	-	244.500	244.500	30.000	274.500	105.500	(30.000)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	350.000	244.500	-	244.500	244.500	30.000	274.500	105.500	(30.000)
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	3.485.000	3.485.000	-	3.485.000	3.485.000	-	3.485.000	-	-
1 02 1 02 01 20 06 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.485.000	3.485.000	-	3.485.000	3.485.000	-	3.485.000	-	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						STSA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI 6 = (4+5)	S/D BULAN LALU	SPJ BULAN INI	S/D BULAN INI 9 = (7+8)	ANGGARAN 10 = (3-6)	UUDP 11 = (6-9)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	59.083.000	25.983.975	9.335.000	35.318.975	25.318.975	14.120.500	49.439.475	23.764.025	35.675.500
1 02 1 02 01 21 02	Penyuluhan mendapatkan lingkungan sehat	31.988.000	16.038.725	9.335.000	25.373.725	25.373.725	1.850.000	27.223.725	6.614.275	(1.850.000)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	22.630.000	13.600.000	5.625.000	19.225.000	19.225.000	-	19.225.000	3.395.000	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.870.000	10.485.000	3.377.500	13.862.500	13.862.500	-	13.862.500	7.500	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3.450.000	3.450.000	-	3.450.000	3.450.000	-	3.450.000	-	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	10.420.000	7.035.000	3.377.500	10.412.500	10.412.500	-	10.412.500	7.500	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	8.760.000	3.115.000	2.257.500	5.372.500	5.372.500	-	5.372.500	3.387.500	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Non PNS	1.530.000	1.505.000	-	1.505.000	1.505.000	-	1.505.000	25.000	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	7.230.000	1.610.000	2.257.500	3.867.500	3.867.500	-	3.867.500	3.362.500	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.358.000	2.438.725	3.700.000	6.138.725	6.138.725	1.850.000	7.988.725	3.219.275	(1.850.000)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	913.000	657.600	-	657.600	657.600	-	657.600	255.400	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	913.000	657.600	-	657.600	657.600	-	657.600	255.400	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 02	Belanja bahan material	300.000	-	200.000	200.000	200.000	100.000	300.000	100.000	(100.000)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	300.000	-	200.000	200.000	200.000	100.000	300.000	100.000	(100.000)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 03	Belanja jasa kantor	5.250.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.750.000	5.250.000	1.750.000	(1.750.000)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 03 13	Belanja jasa uji laboratorium	5.250.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.750.000	5.250.000	1.750.000	(1.750.000)
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	1.050.000	395.125	-	395.125	395.125	-	395.125	654.875	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	1.050.000	395.125	-	395.125	395.125	-	395.125	654.875	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	1.845.000	1.386.000	-	1.386.000	1.386.000	-	1.386.000	459.000	-
1 02 1 02 01 21 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.845.000	1.386.000	-	1.386.000	1.386.000	-	1.386.000	459.000	-
1 02 1 02 01 21 05	Forum Kota Sehat (Pengembangan tatanan kota sehat)	27.095.000	9.945.250	-	9.945.250	9.945.250	12.270.500	22.215.750	17.149.750	(12.270.500)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.020.000	3.455.000	-	3.455.000	3.455.000	7.000.000	10.455.000	10.565.000	(7.000.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.200.000	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	7.200.000	(7.000.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7.200.000	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	7.200.000	(7.000.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	6.820.000	3.455.000	-	3.455.000	3.455.000	-	3.455.000	3.365.000	-
1 02 1 02 01 21 05 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Non PNS	2.040.000	2.040.000	-	2.040.000	2.040.000	-	2.040.000	-	-
1 02 1 02 01 21 05 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	4.780.000	1.415.000	-	1.415.000	1.415.000	-	1.415.000	3.365.000	-
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.075.000	6.490.250	-	6.490.250	6.490.250	5.270.500	11.760.750	6.584.750	(5.270.500)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	500.000	250.000	-	250.000	250.000	174.000	424.000	250.000	(174.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	500.000	250.000	-	250.000	250.000	174.000	424.000	250.000	(174.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	5.375.000	306.250	-	306.250	306.250	4.560.000	4.866.250	5.068.750	(4.560.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 06 01	Belanja cetak	4.500.000	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.500.000	(4.000.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	875.000	306.250	-	306.250	306.250	560.000	866.250	568.750	(560.000)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1.050.000	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	550.000	-
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.050.000	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	550.000	-
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	6.150.000	5.434.000	-	5.434.000	5.434.000	536.500	5.970.500	716.000	(536.500)
1 02 1 02 01 21 05 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000	5.434.000	-	5.434.000	5.434.000	536.500	5.970.500	716.000	(536.500)
1 02 1 02 01 22 01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	288.897.000	178.652.500	29.722.000	208.374.500	208.374.500	14.735.000	223.109.500	60.522.500	(14.735.000)
1 02 1 02 01 22 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	22.720.000	19.425.000	-	19.425.000	19.425.000	1.225.000	20.650.000	3.295.000	(1.225.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	6.680.000	-	6.680.000	6.680.000	1.000.000	7.680.000	1.720.000	(1.000.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.000.000	480.000	-	480.000	480.000	800.000	1.280.000	1.520.000	(800.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	2.000.000	480.000	-	480.000	480.000	800.000	1.280.000	1.520.000	(800.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 1 06	Upah	6.400.000	6.200.000	-	6.200.000	6.200.000	200.000	6.400.000	200.000	(200.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 1 06 01	Upah pekerja	6.400.000	6.200.000	-	6.200.000	6.200.000	200.000	6.400.000	200.000	(200.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.320.000	12.745.000	-	12.745.000	12.745.000	225.000	12.970.000	1.575.000	(225.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	4.320.000	3.645.000	-	3.645.000	3.645.000	225.000	3.870.000	675.000	(225.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 2 01 06	Belanja bahan bakar minyak/gas	4.320.000	3.645.000	-	3.645.000	3.645.000	225.000	3.870.000	675.000	(225.000)
1 02 1 02 01 22 01 5 2 2 02	Belanja bahan material	10.000.000	9.100.000	-	9.100.000	9.100.000	-	9.100.000	900.000	-
1 02 1 02 01 22 01 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000	9.100.000	-	9.100.000	9.100.000	-	9.100.000	900.000	-



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UUDP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 22 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	51.199.000	5.407.500	12.477.500	17.885.000	17.885.000	6.935.000	24.820.000	33.314.000	(6.935.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	50.000.000	5.407.500	12.477.500	17.885.000	17.885.000	6.860.000	24.745.000	32.115.000	(6.860.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 1 01	Honorarium PNS	49.000.000	5.407.500	12.477.500	17.885.000	17.885.000	6.860.000	24.745.000	31.115.000	(6.860.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	49.000.000	5.407.500	12.477.500	17.885.000	17.885.000	6.860.000	24.745.000	31.115.000	(6.860.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
1 02 1 02 01 22 05 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
1 02 1 02 01 22 05 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.199.000	-	-	-	-	75.000	75.000	1.199.000	(75.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengadaan	263.000	-	-	-	-	75.000	75.000	263.000	(75.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	263.000	-	-	-	-	75.000	75.000	263.000	(75.000)
1 02 1 02 01 22 05 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	936.000	-	-	-	-	-	-	936.000	-
1 02 1 02 01 22 05 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	936.000	-	-	-	-	-	-	936.000	-
1 02 1 02 01 22 09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	112.180.000	65.583.000	8.371.500	73.954.500	73.954.500	6.575.000	80.529.500	38.225.500	(6.575.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	63.170.000	25.525.000	6.620.000	32.145.000	32.145.000	6.575.000	38.720.000	31.025.000	(6.575.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01	Honorarium PNS	21.210.000	10.150.000	5.120.000	15.270.000	15.270.000	-	5.940.000	5.940.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4.300.000	-	4.100.000	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	200.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	10.710.000	9.690.000	1.020.000	10.710.000	10.710.000	-	10.710.000	-	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	6.200.000	460.000	-	460.000	460.000	-	460.000	5.740.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	41.960.000	15.375.000	1.500.000	16.875.000	16.875.000	6.575.000	23.450.000	25.085.000	(6.575.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Non PNS	1.360.000	-	-	-	-	-	-	1.360.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	40.600.000	15.375.000	1.500.000	16.875.000	16.875.000	6.575.000	23.450.000	23.725.000	(6.575.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.010.000	40.058.000	1.751.500	41.809.500	41.809.500	-	41.809.500	7.200.500	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.703.000	1.213.000	-	1.213.000	1.213.000	-	1.213.000	490.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.703.000	1.213.000	-	1.213.000	1.213.000	-	1.213.000	490.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengadaan	23.732.000	22.782.000	437.500	23.219.500	23.219.500	-	23.219.500	512.500	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 06 01	Belanja cetak	22.500.000	22.250.000	-	22.250.000	22.250.000	-	22.250.000	250.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	1.232.000	532.000	437.500	969.500	969.500	-	969.500	262.500	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	23.575.000	16.063.000	1.314.000	17.377.000	17.377.000	-	17.377.000	6.198.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.575.000	16.063.000	1.314.000	17.377.000	17.377.000	-	17.377.000	6.198.000	-
1 02 1 02 01 22 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	102.798.000	88.237.000	8.873.000	97.110.000	97.110.000	-	97.110.000	5.688.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	46.410.000	33.305.000	7.955.000	41.340.000	41.340.000	-	41.340.000	5.070.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.350.000	21.010.000	1.520.000	22.530.000	22.530.000	-	22.530.000	820.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	17.000.000	16.830.000	170.000	17.000.000	17.000.000	-	17.000.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	5.000.000	4.160.000	-	4.160.000	4.160.000	-	4.160.000	820.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	23.060.000	12.375.000	6.435.000	18.810.000	18.810.000	-	18.810.000	4.250.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Non PNS	1.360.000	-	1.360.000	1.360.000	1.360.000	-	1.360.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	21.700.000	12.375.000	5.075.000	17.450.000	17.450.000	-	17.450.000	4.250.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.388.000	54.852.000	918.000	55.770.000	55.770.000	-	55.770.000	618.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.288.000	1.288.000	-	1.288.000	1.288.000	-	1.288.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.288.000	1.288.000	-	1.288.000	1.288.000	-	1.288.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengadaan	24.350.000	24.050.000	-	24.050.000	24.050.000	-	24.050.000	300.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 06 01	Belanja cetak	24.000.000	23.700.000	-	23.700.000	23.700.000	-	23.700.000	300.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	350.000	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	30.750.000	29.514.000	918.000	30.432.000	30.432.000	-	30.432.000	318.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.750.000	29.514.000	918.000	30.432.000	30.432.000	-	30.432.000	318.000	-
1 02 1 02 01 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	310.788.000	168.498.250	16.715.000	185.213.250	185.213.250	68.407.500	253.620.750	125.574.750	(68.407.500)
1 02 1 02 01 29 02	Immunisasi bagi anak balita	251.965.000	141.505.000	10.500.000	152.005.000	152.005.000	68.022.500	220.027.500	99.960.000	(68.022.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	191.290.000	110.005.000	10.500.000	120.505.000	120.505.000	50.022.500	170.527.500	70.785.000	(50.022.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	47.130.000	16.117.500	8.120.000	24.237.500	24.237.500	7.017.500	31.255.000	22.892.500	(7.017.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3.450.000	-	-	-	-	-	-	3.450.000	-
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	43.680.000	16.117.500	8.120.000	24.237.500	24.237.500	7.017.500	31.255.000	19.442.500	(7.017.500)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI 6 = (4+5)	S/D BULAN LALU	SP1 BULAN INI	S/D BULAN INI 9 = (7+8)	ANGGARAN 10 = (3-6)	UUOP 11 = (6-9)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	144.160.000	93.887.500	2.380.000	96.267.500	96.267.500	43.005.000	139.272.500	47.892.500	(43.005.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	144.160.000	93.887.500	2.380.000	96.267.500	96.267.500	43.005.000	139.272.500	47.892.500	(43.005.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.675.000	31.500.000	-	31.500.000	31.500.000	18.000.000	49.500.000	29.175.000	(18.000.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 02	Belanja bahan material	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	59.625.000	31.500.000	-	31.500.000	31.500.000	18.000.000	49.500.000	28.125.000	(18.000.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 -11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	59.625.000	31.500.000	-	31.500.000	31.500.000	18.000.000	49.500.000	28.125.000	(18.000.000)
1 02 1 02 01 29 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	22.179.000	16.630.500	-	16.630.500	16.630.500	-	16.630.500	5.548.500	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.970.000	7.370.000	-	7.370.000	7.370.000	-	7.370.000	600.000	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.720.000	4.720.000	-	4.720.000	4.720.000	-	4.720.000	600.000	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	3.020.000	2.620.000	-	2.620.000	2.620.000	-	2.620.000	400.000	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.209.000	9.260.500	-	9.260.500	9.260.500	-	9.260.500	4.948.500	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	764.000	764.000	-	764.000	764.000	-	764.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	664.000	664.000	-	664.000	664.000	-	664.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	350.000	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	350.000	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	9.897.000	4.948.500	-	4.948.500	4.948.500	-	4.948.500	4.948.500	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 10 08	Belanja sewa alat kesehatan/bedokteran	9.897.000	4.948.500	-	4.948.500	4.948.500	-	4.948.500	4.948.500	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	3.198.000	3.198.000	-	3.198.000	3.198.000	-	3.198.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.198.000	3.198.000	-	3.198.000	3.198.000	-	3.198.000	-	-
1 02 1 02 01 29 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.644.000	10.362.750	6.215.000	16.577.750	16.577.750	385.000	16.962.750	20.066.250	(385.000)
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	23.840.000	8.015.000	1.295.000	9.310.000	9.310.000	385.000	9.695.000	14.530.000	(385.000)
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.240.000	7.515.000	1.720.000	8.635.000	8.635.000	385.000	9.020.000	9.605.000	(385.000)
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9.800.000	4.600.000	-	4.600.000	4.600.000	-	4.600.000	5.200.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	4.590.000	2.040.000	-	2.040.000	2.040.000	-	2.040.000	2.550.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	3.850.000	875.000	1.120.000	1.995.000	1.995.000	385.000	2.380.000	1.855.000	(385.000)
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	5.600.000	500.000	175.000	675.000	675.000	-	675.000	4.925.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	5.600.000	500.000	175.000	675.000	675.000	-	675.000	4.925.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.804.000	2.347.750	4.920.000	7.267.750	7.267.750	-	7.267.750	5.536.250	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	497.000	-	-	497.000	497.000	-	497.000	1.614.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.791.000	337.000	-	337.000	337.000	-	337.000	1.454.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	320.000	160.000	-	160.000	160.000	-	160.000	160.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 02	Belanja bahan material	4.920.000	-	4.920.000	4.920.000	4.920.000	-	4.920.000	-	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.920.000	-	4.920.000	4.920.000	4.920.000	-	4.920.000	-	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	525.000	8.750	-	8.750	8.750	-	8.750	516.250	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	525.000	8.750	-	8.750	8.750	-	8.750	516.250	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	5.248.000	1.842.000	-	1.842.000	1.842.000	-	1.842.000	3.406.000	-
1 02 1 02 01 29 07 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.248.000	1.842.000	-	1.842.000	1.842.000	-	1.842.000	3.406.000	-
1 02 1 02 01 30	Program Penilaian Pelayan Kesehatan Lanjut Usia	130.169.000	58.955.500	8.677.500	67.633.000	67.633.000	24.747.500	92.380.500	62.536.000	(24.747.500)
1 02 1 02 01 30 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	130.169.000	58.955.500	8.677.500	67.633.000	67.633.000	24.747.500	92.380.500	62.536.000	(24.747.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	82.425.000	39.880.000	3.777.500	43.657.500	43.657.500	15.607.500	59.265.000	38.767.500	(15.607.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	16.425.000	9.195.000	2.117.500	11.312.500	11.312.500	1.522.500	12.835.000	5.112.500	(1.522.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5.750.000	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	3.450.000	-
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	10.675.000	6.895.000	2.117.500	9.012.500	9.012.500	1.522.500	10.535.000	1.662.500	(1.522.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	66.000.000	30.685.000	-	32.345.000	32.345.000	14.085.000	46.430.000	33.655.000	(14.085.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	55.550.000	25.860.000	1.100.000	26.960.000	26.960.000	12.510.000	39.470.000	28.590.000	(12.510.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	10.450.000	4.825.000	560.000	5.385.000	5.385.000	1.575.000	6.960.000	5.065.000	(1.575.000)





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (A P B D) RINCIAN KOTA PADANG PANJANG  
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2009  
BULAN : DESEMBER 2010**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	URUP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	638.400.000	-	-	-	633.932.900	139.127.000	773.059.900	638.400.000	-
1 02 1 02 01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.400.000	-	-	-	633.932.900	139.127.000	773.059.900	638.400.000	-
1 02 1 02 01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	638.400.000	-	-	-	633.932.900	139.127.000	773.059.900	638.400.000	-
1 02 1 02 01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	638.400.000	-	-	-	633.932.900	139.127.000	773.059.900	638.400.000	-
1 02 1 02 01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	638.400.000	-	-	-	633.932.900	139.127.000	773.059.900	638.400.000	-
1 02 1 02	BELANJA TIDAK LANGSUNG dan BELANJA LANGSUNG	15.297.773.800	11.617.738.493	2.639.725.951	14.257.464.444	11.478.760.580	2.741.828.164	14.220.588.744	1.040.309.354	36.875.700
1 02 1 02 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	15.297.773.800	11.617.738.493	2.639.725.951	14.257.464.444	11.478.760.580	2.741.828.164	14.220.588.744	1.040.309.354	36.875.700
1 02 1 02 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.260.586.000	5.652.645.778	465.715.743	6.118.361.521	5.652.645.778	465.715.743	6.118.361.521	6.260.586.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	6.260.586.000	5.652.645.778	465.715.743	6.118.361.521	5.652.645.778	465.715.743	6.118.361.521	6.260.586.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	5.286.111.000	4.777.020.778	398.090.743	5.175.111.521	4.777.020.778	398.090.743	5.175.111.521	5.286.111.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS	3.941.090.000	3.513.248.120	294.122.400	3.807.370.520	3.513.248.120	294.122.400	3.807.370.520	3.941.090.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	328.283.000	295.044.390	25.247.806	320.292.196	295.044.390	25.247.806	320.292.196	328.283.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	229.645.000	197.750.000	17.105.000	214.855.000	197.750.000	17.105.000	214.855.000	229.645.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	353.243.000	323.840.000	27.100.000	350.940.000	323.840.000	27.100.000	350.940.000	353.243.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	106.405.000	104.305.000	7.645.000	111.950.000	104.305.000	7.645.000	111.950.000	106.405.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	240.375.000	258.869.160	20.295.000	279.164.160	258.869.160	20.295.000	279.164.160	240.375.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.972.000	83.839.510	6.568.619	90.408.129	83.839.510	6.568.619	90.408.129	86.972.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 01 08	Pembuatan Gaji	98.000	124.598	6.918	131.516	124.598	6.918	131.516	98.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	974.475.000	875.625.000	67.625.000	943.250.000	875.625.000	67.625.000	943.250.000	974.475.000	-
1 02 1 02 01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	974.475.000	875.625.000	67.625.000	943.250.000	875.625.000	67.625.000	943.250.000	974.475.000	-
1 02 1 02 01	BELANJA LANGSUNG	9.037.187.800	5.965.092.715	2.174.010.208	8.139.102.923	5.826.114.802	2.276.112.421	8.102.227.223	1.173.084.877	36.875.700
	UANG PERSEDIAAN	-	275.000.000	-	275.000.000	-	-	-	-	275.000.000
1 02 1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.177.019.800	769.342.300	52.136.362	821.478.662	800.326.662	127.279.000	927.607.662	1.177.019.800	(106.129.000)
1 02 1 02 01 01 01	Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat	2.385.000	2.304.000	-	2.304.000	2.304.000	-	2.304.000	2.385.000	81.000
1 02 1 02 01 01 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.385.000	2.304.000	-	2.304.000	2.304.000	-	2.304.000	2.385.000	81.000
1 02 1 02 01 01 01 5 2 2 01	Belanja Bahan habis pakai	2.385.000	2.304.000	-	2.304.000	2.304.000	-	2.304.000	2.385.000	81.000
1 02 1 02 01 01 01 5 2 2 01 04	Belanja perangkat, material, dan benda pos lainnya	2.385.000	2.304.000	-	2.304.000	2.304.000	-	2.304.000	2.385.000	81.000
1 02 1 02 01 01 02	Pemeliharaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	118.200.000	66.573.145	2.648.962	69.222.107	69.222.107	9.889.100	79.111.207	48.977.893	(9.889.100)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.200.000	66.573.145	2.648.962	69.222.107	69.222.107	9.889.100	79.111.207	48.977.893	(9.889.100)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	118.200.000	66.573.145	2.648.962	69.222.107	69.222.107	9.889.100	79.111.207	48.977.893	(9.889.100)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	25.600.000	16.861.247	481.327	17.342.574	17.342.574	2.450.290	19.792.864	8.257.426	(2.450.290)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 02	Belanja Air	7.800.000	5.255.030	812.200	6.067.230	6.067.230	357.400	6.424.630	1.732.770	(357.400)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	54.800.000	29.714.425	793.185	30.507.610	30.507.610	5.704.410	36.212.020	24.292.390	(5.704.410)
1 02 1 02 01 01 02 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimil/internet	30.000.000	14.742.443	562.250	15.304.693	15.304.693	1.377.000	16.681.693	14.695.307	(1.377.000)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			SP2D S/D BULAN TALI	BULAN INT	S/D BULAN INT	SPJ S/D BULAN TALI	BULAN INT	S/D BULAN INT	ANGGARAN	UDUP
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10=(3-4)	11=(6-9)
1 02 1 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	316.606.000	176.993.432	5.294.000	182.277.432	182.277.432	19.837.400	202.114.832	139.612.568	(19.837.400)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	316.606.000	176.993.432	5.294.000	182.277.432	182.277.432	19.837.400	202.114.832	139.612.568	(19.837.400)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	316.606.000	176.993.432	5.294.000	182.277.432	182.277.432	19.837.400	202.114.832	139.612.568	(19.837.400)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	13.000.000	6.564.400	800.000	7.364.400	7.364.400	1.475.000	8.839.800	6.435.600	(1.475.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.750.000	37.799.282	2.895.000	40.694.282	40.694.282	11.576.000	52.270.282	66.055.718	(11.576.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	184.296.000	131.170.750	1.420.000	132.590.750	132.590.750	5.763.000	138.353.750	51.705.250	(5.763.000)
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR	1.560.000	-	-	-	-	-	-	1.560.000	-
1 02 1 02 01 01 06 5 2 2 05 05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	10.200.000	1.459.000	169.000	1.628.000	1.628.000	1.021.000	2.651.000	8.572.000	(1.021.000)
1 02 1 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	126.450.000	89.860.000	22.790.000	112.650.000	112.650.000	21.690.000	134.340.000	36.800.000	(22.790.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	126.450.000	89.860.000	22.790.000	112.650.000	112.650.000	21.690.000	134.340.000	36.800.000	(22.790.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 01	Honorarium PNS	118.450.000	89.550.000	20.250.000	109.800.000	109.800.000	20.250.000	129.800.000	8.650.000	-
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.450.000	89.550.000	20.250.000	109.800.000	109.800.000	20.250.000	129.800.000	8.650.000	-
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 03	Uang Lembur	8.000.000	310.000	2.540.000	2.850.000	2.850.000	1.440.000	4.290.000	5.150.000	(2.440.000)
1 02 1 02 01 01 07 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	8.000.000	310.000	2.540.000	2.850.000	2.850.000	1.440.000	4.290.000	5.150.000	(2.440.000)
1 02 1 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.325.000	9.581.000	968.500	10.549.500	10.549.500	520.500	11.070.000	2.775.500	(9.581.000)
1 02 1 02 01 01 08 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.325.000	9.581.000	968.500	10.549.500	10.549.500	520.500	11.070.000	2.775.500	(9.581.000)
1 02 1 02 01 01 08 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	13.325.000	9.581.000	968.500	10.549.500	10.549.500	520.500	11.070.000	2.775.500	(9.581.000)
1 02 1 02 01 01 08 5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.325.000	9.581.000	968.500	10.549.500	10.549.500	520.500	11.070.000	2.775.500	(9.581.000)
1 02 1 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	67.277.000	46.075.654	936.500	47.012.154	47.012.154	7.852.500	54.864.654	20.264.846	(7.852.500)
1 02 1 02 01 01 10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.277.000	46.075.654	936.500	47.012.154	47.012.154	7.852.500	54.864.654	20.264.846	(7.852.500)
1 02 1 02 01 01 10 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	67.277.000	46.075.654	936.500	47.012.154	47.012.154	7.852.500	54.864.654	20.264.846	(7.852.500)
1 02 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	67.277.000	46.075.654	936.500	47.012.154	47.012.154	7.852.500	54.864.654	20.264.846	(7.852.500)
1 02 1 02 01 01 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	44.888.000	28.114.869	875.000	28.989.869	28.989.869	13.865.500	42.855.369	15.898.131	(13.865.500)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.888.000	28.114.869	875.000	28.989.869	28.989.869	13.865.500	42.855.369	15.898.131	(13.865.500)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	44.888.000	28.114.869	875.000	28.989.869	28.989.869	13.865.500	42.855.369	15.898.131	(13.865.500)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2 06 01	Belanja cetak	31.088.000	17.824.500	-	17.824.500	17.824.500	11.677.000	29.501.500	11.263.500	(11.677.000)
1 02 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	13.800.000	10.290.369	875.000	11.165.369	11.165.369	2.188.500	13.353.869	2.634.631	(2.188.500)
1 02 1 02 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/honorarium benangan kantor	6.163.800	3.139.000	-	3.139.000	3.139.000	945.000	4.084.000	3.024.800	(945.000)
1 02 1 02 01 01 12 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.163.800	3.139.000	-	3.139.000	3.139.000	945.000	4.084.000	3.024.800	(945.000)
1 02 1 02 01 01 12 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	6.163.800	3.139.000	-	3.139.000	3.139.000	945.000	4.084.000	3.024.800	(945.000)
1 02 1 02 01 01 12 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	6.163.800	3.139.000	-	3.139.000	3.139.000	945.000	4.084.000	3.024.800	(945.000)
1 02 1 02 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.415.000	20.032.500	1.040.000	21.072.500	21.072.500	3.954.000	25.026.500	12.342.500	(3.954.000)
1 02 1 02 01 01 17 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.415.000	20.032.500	1.040.000	21.072.500	21.072.500	3.954.000	25.026.500	12.342.500	(3.954.000)
1 02 1 02 01 01 17 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	33.415.000	20.032.500	1.040.000	21.072.500	21.072.500	3.954.000	25.026.500	12.342.500	(3.954.000)
1 02 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.415.000	20.032.500	1.040.000	21.072.500	21.072.500	3.954.000	25.026.500	12.342.500	(3.954.000)
1 02 1 02 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	118.000.000	68.527.900	7.673.400	76.201.300	76.201.300	14.751.300	90.952.600	41.798.700	(14.751.300)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.000.000	68.527.900	7.673.400	76.201.300	76.201.300	14.751.300	90.952.600	41.798.700	(14.751.300)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas	118.000.000	68.527.900	7.673.400	76.201.300	76.201.300	14.751.300	90.952.600	41.798.700	(14.751.300)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000	29.270.000	1.050.000	30.320.000	30.320.000	1.475.000	31.795.000	7.680.000	(1.475.000)
1 02 1 02 01 01 18 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000	39.257.900	6.623.400	45.881.300	45.881.300	13.276.300	59.157.600	34.118.700	(13.276.300)
1 02 1 02 01 01 19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/belanja perantara	175.320.000	142.607.500	9.920.000	152.527.500	152.527.500	11.487.500	164.015.000	22.792.500	(11.487.500)
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	175.320.000	142.607.500	9.920.000	152.527.500	152.527.500	11.487.500	164.015.000	22.792.500	(11.487.500)
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	175.320.000	142.607.500	9.920.000	152.527.500	152.527.500	11.487.500	164.015.000	22.792.500	(11.487.500)
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai honore/tidak tetap	175.320.000	142.607.500	9.920.000	152.527.500	152.527.500	11.487.500	164.015.000	22.792.500	(11.487.500)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI 6 = (4+5)	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI 9 = (7+8)	ANGGARAN 10 = (3+6)	UNDP 11 = (6+9)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3+6)	11 = (6+9)
1 02 1 02 01 01 30	Penyediaan jasa media	155.000.000	115.533.300	-	115.533.300	115.533.300	22.486.200	138.019.500	39.466.700	(22.486.200)
1 02 1 02 01 01 30 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000	115.533.300	-	115.533.300	115.533.300	22.486.200	138.019.500	39.466.700	(22.486.200)
1 02 1 02 01 01 30 5 2 2 03	Belanja jasa kantor	155.000.000	115.533.300	-	115.533.300	115.533.300	22.486.200	138.019.500	39.466.700	(22.486.200)
1 02 1 02 01 01 30 5 2 2 03 12	Belanja jasa medis	155.000.000	115.533.300	-	115.533.300	115.533.300	22.486.200	138.019.500	39.466.700	(22.486.200)
1 02 1 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.795.661.000	1.660.136.115	943.859.371	2.613.995.486	2.662.628.115	969.956.871	2.633.585.965	2.613.995.486	(8.940.500)
1 02 1 02 01 02 07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	43.450.000	2.882.500	39.040.000	42.722.500	2.882.500	39.040.000	42.722.500	727.500	-
1 02 1 02 01 02 07 5 2 3	BELANJA MODAL	43.450.000	2.882.500	39.040.000	42.722.500	2.882.500	39.040.000	42.722.500	727.500	-
1 02 1 02 01 02 07 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	40.450.000	-	39.040.000	39.040.000	-	39.040.000	39.040.000	610.000	-
1 02 1 02 01 02 07 5 2 3 13 10	Belanja modal pengadaan karpet dan gorden kantor	40.450.000	-	39.040.000	39.040.000	-	39.040.000	39.040.000	610.000	-
1 02 1 02 01 02 07 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000	2.882.500	-	2.882.500	2.882.500	-	2.882.500	117.500	-
1 02 1 02 01 02 07 5 2 3 17 04	Belanja modal pengadaan Radio HF/EM (Handy Talkie)	3.000.000	2.882.500	-	2.882.500	2.882.500	-	2.882.500	117.500	-
1 02 1 02 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.500.000	65.294.900	7.618.000	72.912.900	67.412.900	11.520.500	78.933.400	10.587.100	(6.020.500)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	3.955.000	700.000	4.455.000	4.455.000	1.295.000	5.750.000	4.545.000	(1.295.000)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 1 06	Upah	9.000.000	3.755.000	700.000	4.455.000	4.455.000	1.295.000	5.750.000	4.545.000	(1.295.000)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 1 06 01	Upah Pekerja	9.000.000	3.755.000	700.000	4.455.000	4.455.000	1.295.000	5.750.000	4.545.000	(1.295.000)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.500.000	61.539.900	6.918.000	68.457.900	62.957.900	10.225.500	73.183.400	6.042.100	(4.725.500)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 20	Belanja pemeliharaan	69.000.000	61.539.900	1.418.000	62.957.900	62.957.900	4.725.500	67.683.400	6.042.100	(4.725.500)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung	69.000.000	61.539.900	1.418.000	62.957.900	62.957.900	4.725.500	67.683.400	6.042.100	(4.725.500)
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 21	Belanja jasa konsultasi	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	-
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	-
1 02 1 02 01 02 22 5 2 2 21 04	Belanja jasa konsultasi pengawasan	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	-
1 02 1 02 01 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	38.323.000	14.529.300	375.000	14.904.300	14.904.300	2.570.000	17.474.300	23.418.700	(2.570.000)
1 02 1 02 01 02 30 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	38.323.000	14.529.300	375.000	14.904.300	14.904.300	2.570.000	17.474.300	23.418.700	(2.570.000)
1 02 1 02 01 02 30 5 2 1 06	Upah	38.323.000	14.529.300	375.000	14.904.300	14.904.300	2.570.000	17.474.300	23.418.700	(2.570.000)
1 02 1 02 01 02 30 5 2 1 06 02	Upah jasa service	38.323.000	14.529.300	375.000	14.904.300	14.904.300	2.570.000	17.474.300	23.418.700	(2.570.000)
1 02 1 02 01 02 46	DAK Bidang Kesehatan	2.452.120.000	1.575.248.420	744.572.371	2.319.820.791	1.575.248.420	744.572.371	2.319.820.791	132.299.209	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	842.120.000	562.908.500	253.359.591	816.268.091	562.908.500	253.359.591	816.268.091	25.851.909	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	583.660.000	359.558.500	203.659.591	563.218.091	359.558.500	203.659.591	563.218.091	20.441.909	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	203.660.000	-	203.659.591	203.659.591	-	203.659.591	203.659.591	409	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia	380.000.000	359.558.500	-	359.558.500	359.558.500	-	359.558.500	20.441.500	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 2 20	Belanja pemeliharaan	258.460.000	203.350.000	49.700.000	253.050.000	203.350.000	49.700.000	253.050.000	5.410.000	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung	258.460.000	203.350.000	49.700.000	253.050.000	203.350.000	49.700.000	253.050.000	5.410.000	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3	BELANJA MODAL	1.610.000.000	1.012.339.920	491.212.780	1.503.552.700	1.012.339.920	491.212.780	1.503.552.700	106.447.300	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 26	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	1.610.000.000	1.012.339.920	491.212.780	1.503.552.700	1.012.339.920	491.212.780	1.503.552.700	106.447.300	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	800.000.000	426.553.620	284.369.080	710.922.700	426.553.620	284.369.080	710.922.700	89.077.300	-
1 02 1 02 01 02 46 5 2 3 26 03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	810.000.000	585.786.300	206.843.700	792.630.000	585.786.300	206.843.700	792.630.000	17.370.000	-
1 02 1 02 01 02 47	Pentunjang Operasional DAK	178.268.000	2.180.995	171.454.000	173.634.995	1.180.995	171.454.000	173.634.995	4.633.005	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.650.000	-	9.250.000	9.250.000	-	9.250.000	9.250.000	400.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.650.000	-	9.250.000	9.250.000	-	9.250.000	9.250.000	400.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.200.000	-	5.800.000	5.800.000	-	5.800.000	5.800.000	400.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 1 01 02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	3.450.000	-	3.450.000	3.450.000	-	3.450.000	3.450.000	-	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.618.000	2.180.995	162.204.000	164.384.995	2.180.995	162.204.000	164.384.995	4.233.005	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	333.000	306.000	-	306.000	306.000	-	306.000	27.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	333.000	306.000	-	306.000	306.000	-	306.000	27.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 03	Belanja jasa kantor	4.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 03 04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemerasan lelang	4.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	3.000.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggantian	875.000	874.995	-	874.995	874.995	-	874.995	5	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 06 02	Belanja penggantian	875.000	874.995	-	874.995	874.995	-	874.995	5	-



KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH ANGGARAN	REALISASI						RISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI 6 = (4 + 5)	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI 9 = (7 + 8)	ANGGARAN 10 = (3 + 9)	UNDP 11 = (6 + 10)
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7	8	9 = (7 + 8)	10 = (3 + 9)	11 = (6 + 10)
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	410.000	-	-	-	-	-	-	410.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	410.000	-	-	-	-	-	-	410.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 21	Belanja jasa konsultansi	163.000.000	-	162.204.000	162.204.000	-	162.204.000	162.204.000	296.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	98.000.000	-	97.704.000	97.704.000	-	97.704.000	97.704.000	296.000	-
1 02 1 02 01 02 47 5 2 2 21 04	Belanja jasa konsultansi pengawasan	65.000.000	-	64.500.000	64.500.000	-	64.500.000	64.500.000	500.000	-
1 02 1 02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	56.500.000	-	55.700.000	55.700.000	-	56.050.000	56.050.000	800.000	(350.000)
1 02 1 02 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56.500.000	-	55.700.000	55.700.000	-	56.050.000	56.050.000	800.000	(350.000)
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.500.000	-	55.700.000	55.700.000	-	56.050.000	56.050.000	800.000	(350.000)
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2 12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	55.800.000	-	55.700.000	55.700.000	-	55.700.000	55.700.000	100.000	-
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2 12 02	Belanja pakaian sipil harian	55.800.000	-	55.700.000	55.700.000	-	55.700.000	55.700.000	100.000	-
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	700.000	-	-	-	-	350.000	350.000	700.000	(350.000)
1 02 1 02 01 03 02 5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	700.000	-	-	-	-	350.000	350.000	700.000	(350.000)
1 02 1 02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.898.000	23.125.000	19.100.000	42.225.000	25.125.000	19.821.500	44.946.500	14.823.000	(2.721.500)
1 02 1 02 01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	49.898.000	17.975.000	17.100.000	35.075.000	17.975.000	17.571.500	35.546.500	14.823.000	(471.500)
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	41.375.000	17.100.000	17.100.000	34.200.000	17.100.000	17.100.000	34.200.000	7.175.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.375.000	17.100.000	17.100.000	34.200.000	17.100.000	17.100.000	34.200.000	5.135.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	35.500.000	17.100.000	17.100.000	34.200.000	17.100.000	17.100.000	34.200.000	1.300.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transport PNS	3.835.000	-	-	-	-	-	-	3.835.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.040.000	-	-	-	-	-	-	2.040.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.040.000	-	-	-	-	-	-	2.040.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.523.000	875.000	-	875.000	875.000	471.500	1.346.500	7.648.000	(471.500)
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.703.000	-	-	-	-	-	-	1.703.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.703.000	-	-	-	-	-	-	1.703.000	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	5.945.000	-	-	-	-	471.500	471.500	5.945.000	(471.500)
1 02 1 02 01 05 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.945.000	-	-	-	-	471.500	471.500	5.945.000	(471.500)
1 02 1 02 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	26.000.000	5.150.000	2.000.000	7.150.000	7.150.000	2.250.000	9.400.000	18.850.000	(2.250.000)
1 02 1 02 01 05 03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000	5.150.000	2.000.000	7.150.000	7.150.000	2.250.000	9.400.000	18.850.000	(2.250.000)
1 02 1 02 01 05 03 5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000	5.150.000	2.000.000	7.150.000	7.150.000	2.250.000	9.400.000	18.850.000	(2.250.000)
1 02 1 02 01 05 03 5 2 2 17 03	Belanja bimbingan teknis	26.000.000	5.150.000	2.000.000	7.150.000	7.150.000	2.250.000	9.400.000	18.850.000	(2.250.000)
1 02 1 02 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.229.000	834.750	-	834.750	834.750	382.800	1.217.550	382.800	(382.800)
1 02 1 02 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lictisar realisasi kinerja SKP	244.000	242.000	-	242.000	242.000	-	242.000	2.000	-
1 02 1 02 01 06 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000	242.000	-	242.000	242.000	-	242.000	2.000	-
1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	174.000	174.000	-	174.000	174.000	-	174.000	-	-
1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	174.000	174.000	-	174.000	174.000	-	174.000	-	-
1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	70.000	68.000	-	68.000	68.000	-	68.000	2.000	-
1 02 1 02 01 06 01 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	70.000	68.000	-	68.000	68.000	-	68.000	2.000	-
1 02 1 02 01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	352.000	349.250	-	349.250	349.250	-	349.250	2.750	-
1 02 1 02 01 06 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	352.000	349.250	-	349.250	349.250	-	349.250	2.750	-
1 02 1 02 01 06 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	247.000	246.000	-	246.000	246.000	-	246.000	1.000	-
1 02 1 02 01 06 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	247.000	246.000	-	246.000	246.000	-	246.000	1.000	-
1 02 1 02 01 06 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	105.000	103.250	-	103.250	103.250	-	103.250	1.750	-
1 02 1 02 01 06 02 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	105.000	103.250	-	103.250	103.250	-	103.250	1.750	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI 6 = (4+5)	S/D BULAN LALU	SP1 BULAN INI	S/D BULAN INI 9 = (7+8)	ANGGARAN 10 = (3-6)	UUDP 11 = (6-9)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 06 03	Pemvynan pelaksanaan pemonas realisasi anggaran	244.000	243.500	-	243.500	243.500	-	243.500	500	-
1 02 1 02 01 06 03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000	243.500	-	243.500	243.500	-	243.500	500	-
1 02 1 02 01 06 03 5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis	174.000	173.500	-	173.500	173.500	-	173.500	500	-
1 02 1 02 01 06 03 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	174.000	173.500	-	173.500	173.500	-	173.500	500	-
1 02 1 02 01 06 03 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	-	-
1 02 1 02 01 06 03 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	-	-
1 02 1 02 01 06 04	Pemvynan pelaksanaan kewangan akhir tahun	389.000	-	-	-	-	382.800	382.800	389.000	(382.800)
1 02 1 02 01 06 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	389.000	-	-	-	-	382.800	382.800	389.000	(382.800)
1 02 1 02 01 06 04 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	284.000	-	-	-	-	282.500	282.500	284.000	(282.500)
1 02 1 02 01 06 04 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	284.000	-	-	-	-	282.500	282.500	284.000	(282.500)
1 02 1 02 01 06 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	105.000	-	-	-	-	100.300	100.300	105.000	(100.300)
1 02 1 02 01 06 04 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	105.000	-	-	-	-	100.300	100.300	105.000	(100.300)
1 02 1 02 01 16	Program Uapya Kesehatan Masyarakat	3.104.502.000	2.424.803.750	489.233.500	2.914.037.250	2.433.873.750	497.151.000	2.931.024.750	3.104.502.000	(16.987.500)
1 02 1 02 01 16 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	40.585.000	21.797.500	1.382.500	25.180.000	24.322.500	3.307.500	27.630.000	40.585.000	(2.450.000)
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	30.532.500	13.895.000	1.362.500	15.277.500	14.420.000	3.307.500	17.727.500	30.532.500	(2.450.000)
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.882.500	10.077.500	1.382.500	11.460.000	10.602.500	2.870.000	13.472.500	17.882.500	(2.012.500)
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/parasumber	3.220.000	3.220.000	-	3.220.000	3.220.000	-	3.220.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	12.262.500	4.457.500	1.382.500	5.840.000	4.982.500	2.870.000	7.852.500	12.262.500	(2.012.500)
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	12.650.000	3.817.500	-	3.817.500	3.817.500	437.500	4.255.000	12.650.000	(437.500)
1 02 1 02 01 16 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	12.650.000	3.817.500	-	3.817.500	3.817.500	437.500	4.255.000	12.650.000	(437.500)
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.052.500	9.902.500	-	9.902.500	9.902.500	-	9.902.500	10.052.500	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	865.500	715.500	-	715.500	715.500	-	715.500	865.500	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	715.500	715.500	-	715.500	715.500	-	715.500	715.500	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 02	Belanja bahan/material	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 02 06	Belanja bahan alat percontohan	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	3.362.000	3.362.000	-	3.362.000	3.362.000	-	3.362.000	-	-
1 02 1 02 01 16 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.362.000	3.362.000	-	3.362.000	3.362.000	-	3.362.000	-	-
1 02 1 02 01 16 06	Revitalisasi sistem kesehatan	55.886.000	48.054.400	4.500.000	52.554.400	52.554.400	-	52.554.400	55.886.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	20.615.000	19.640.000	-	19.640.000	19.640.000	-	19.640.000	20.615.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	-	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	-	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	15.315.000	14.340.000	-	14.340.000	14.340.000	-	14.340.000	15.315.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/parasumber	6.715.000	6.715.000	-	6.715.000	6.715.000	-	6.715.000	-	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	8.600.000	7.625.000	-	7.625.000	7.625.000	-	7.625.000	8.600.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.271.000	28.414.400	4.500.000	32.914.400	32.914.400	-	32.914.400	35.271.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.528.000	1.363.400	-	1.363.400	1.363.400	-	1.363.400	1.528.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.348.000	1.195.400	-	1.195.400	1.195.400	-	1.195.400	1.348.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	180.000	168.000	-	168.000	168.000	-	168.000	180.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 02	Belanja bahan/material	19.575.000	14.875.000	4.500.000	19.375.000	19.375.000	-	19.375.000	19.575.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 02 06	Belanja bahan alat percontohan	19.575.000	14.875.000	4.500.000	19.375.000	19.375.000	-	19.375.000	19.575.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	4.041.000	3.550.500	-	3.550.500	3.550.500	-	3.550.500	4.041.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 06 01	Belanja cetak	3.761.000	3.270.500	-	3.270.500	3.270.500	-	3.270.500	3.761.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	280.000	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000	280.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	10.127.000	8.625.500	-	8.625.500	8.625.500	-	8.625.500	10.127.000	-
1 02 1 02 01 16 06 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.127.000	8.625.500	-	8.625.500	8.625.500	-	8.625.500	10.127.000	-



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			SP2D		SPJ		SISA		ANGGARAN 10 = (3-8)	UUDP 11 = (6-9)
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)		
1 02 1 02 01 16 07	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	13.867.000	7.884.600	650.000	8.534.600	8.534.600	1.010.000	9.544.600	5.332.400	(1.010.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.260.000	7.570.000	650.000	8.220.000	8.220.000	860.000	9.080.000	5.040.000	(860.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.660.000	4.690.000	350.000	5.040.000	5.040.000	560.000	5.600.000	4.620.000	(560.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	9.660.000	4.690.000	350.000	5.040.000	5.040.000	560.000	5.600.000	4.620.000	(560.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 1 06	Upah	3.600.000	2.880.000	300.000	3.180.000	3.180.000	300.000	3.480.000	420.000	(300.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 1 06 01	Upah pekerja	3.600.000	2.880.000	300.000	3.180.000	3.180.000	300.000	3.480.000	420.000	(300.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	607.000	314.600	-	314.600	314.600	150.000	464.600	292.400	(150.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	432.000	314.600	-	314.600	314.600	-	314.600	117.400	-
1 02 1 02 01 16 07 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	432.000	314.600	-	314.600	314.600	-	314.600	117.400	-
1 02 1 02 01 16 07 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	175.000	-	-	-	-	150.000	150.000	175.000	(150.000)
1 02 1 02 01 16 07 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	175.000	-	-	-	-	150.000	150.000	175.000	(150.000)
1 02 1 02 01 16 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	106.007.000	38.660.500	55.200.000	93.860.500	38.660.500	57.004.000	95.864.500	12.146.500	(1.804.000)
1 02 1 02 01 16 09 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	81.500.000	18.145.000	55.200.000	73.345.000	18.145.000	55.200.000	73.345.000	8.155.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.750.000	2.100.000	4.650.000	6.750.000	2.100.000	4.650.000	6.750.000	-	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.750.000	2.100.000	4.650.000	6.750.000	2.100.000	4.650.000	6.750.000	-	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	74.750.000	16.045.000	50.550.000	66.595.000	16.045.000	50.550.000	66.595.000	8.155.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	61.000.000	6.120.000	50.550.000	56.670.000	6.120.000	50.550.000	56.670.000	4.330.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	13.750.000	9.925.000	-	9.925.000	9.925.000	-	9.925.000	3.825.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.507.000	20.515.500	-	20.515.500	20.515.500	1.804.000	22.319.500	3.991.500	(1.804.000)
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	4.232.000	3.447.500	-	3.447.500	3.447.500	-	3.447.500	784.500	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.282.000	2.847.500	-	2.847.500	2.847.500	-	2.847.500	434.500	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 01 10	Belanja dekorasi	800.000	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	200.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	3.875.000	2.515.000	-	2.515.000	2.515.000	-	2.515.000	1.360.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 06 01	Belanja cetak	3.000.000	1.815.000	-	1.815.000	1.815.000	-	1.815.000	1.185.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	875.000	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	175.000	-
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	16.400.000	14.553.000	-	14.553.000	14.553.000	1.804.000	16.357.000	1.847.000	(1.804.000)
1 02 1 02 01 16 09 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.400.000	14.553.000	-	14.553.000	14.553.000	1.804.000	16.357.000	1.847.000	(1.804.000)
1 02 1 02 01 16 11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	50.822.000	19.790.000	-	19.790.000	19.790.000	2.115.000	21.905.000	31.032.000	(2.115.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	19.830.000	3.240.000	-	3.240.000	3.240.000	560.000	3.800.000	16.590.000	(560.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.830.000	2.240.000	-	2.240.000	2.240.000	560.000	2.800.000	10.590.000	(560.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.380.000	-	-	-	-	-	-	3.380.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	7.950.000	2.240.000	-	2.240.000	2.240.000	560.000	2.800.000	5.710.000	(560.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	7.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000	6.000.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.042.000	6.810.000	-	6.810.000	6.810.000	656.000	7.466.000	13.232.000	(656.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	4.947.000	3.366.000	-	3.366.000	3.366.000	-	3.366.000	1.481.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	957.000	-	-	-	-	-	-	957.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 01 07	Belanja dokumentasi/administrasi tender	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.740.000	3.366.000	-	3.366.000	3.366.000	-	3.366.000	374.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	14.145.000	3.444.000	-	3.444.000	3.444.000	656.000	4.100.000	10.701.000	(656.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.145.000	3.444.000	-	3.444.000	3.444.000	656.000	4.100.000	10.701.000	(656.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3	BELANJA MODAL	10.950.000	9.740.000	-	9.740.000	9.740.000	900.000	10.640.000	210.000	(900.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3 13	Belanja modal pengadaan komputer	5.000.000	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	200.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3 13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	5.000.000	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	200.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3 16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	950.000	-	-	-	-	900.000	900.000	950.000	(900.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3 16 05	Belanja modal pengadaan sound system dan lighting	950.000	-	-	-	-	900.000	900.000	950.000	(900.000)
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3 19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	5.000.000	4.940.000	-	4.940.000	4.940.000	-	4.940.000	60.000	-
1 02 1 02 01 16 11 5 2 3 13 07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.000.000	4.940.000	-	4.940.000	4.940.000	-	4.940.000	60.000	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	REALISASI				SISA			
			SP20	SP21	SP22	SP23				
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8 = (7+8)	9 = (6+9)	10 = (3+9)	11 = (6+9)
1 02 1 02 01 16 12 5 2 1	BELAJA PEGAWAI	97.630.000	44.580.000	9.500.000	54.080.000	44.580.000	5.500.000	54.080.000	41.550.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	16.080.000	16.080.000	-	16.080.000	16.080.000	-	16.080.000	16.080.000	
1 02 1 02 01 17 12 5 2 1 01 01	Honorarium penuh pelaksana kegiatan	15.450.000	15.450.000	-	15.450.000	15.450.000	-	15.450.000	15.450.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 1 01 04	Honorarium/uang penggantian transpor PNS	630.000	630.000	-	630.000	630.000	-	630.000	630.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	61.550.000	61.550.000	9.500.000	36.000.000	26.500.000	9.500.000	36.000.000	41.550.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000	28.500.000	-	28.500.000	28.500.000	-	28.500.000	28.500.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	2.632.050.000	2.161.944.000	414.606.000	2.576.550.000	2.161.944.000	414.606.000	2.576.550.000	45.500.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 04	Belanja sewa Asuransi	2.630.000.000	2.160.000.000	414.606.000	2.574.606.000	2.160.000.000	414.606.000	2.574.606.000	45.500.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 04 03	Belanja premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	2.630.000.000	2.160.000.000	414.606.000	2.574.606.000	2.160.000.000	414.606.000	2.574.606.000	45.500.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	-	1.944.000	106.000	
1 02 1 02 01 16 12 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	-	1.944.000	106.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 02 01	Uraian kesehatan sekebih	117.655.000	80.927.750	3.395.000	83.487.750	83.487.750	9.607.500	93.095.250	34.167.250	(9.607.500)
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 01	BELAJA PEGAWAI	51.635.000	41.845.000	3.395.000	45.240.000	45.240.000	9.607.500	54.847.500	29.605.000	(9.607.500)
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 01 01	Honorarium PNS	16.080.000	16.080.000	-	16.080.000	16.080.000	-	16.080.000	16.080.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 01 04	Honorarium penuh pelaksana kegiatan	15.450.000	15.450.000	-	15.450.000	15.450.000	-	15.450.000	15.450.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 02 01	Honorarium/uang penggantian transpor PNS	630.000	630.000	-	630.000	630.000	-	630.000	630.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 02 04	Honorarium Non PNS	61.550.000	61.550.000	3.395.000	36.000.000	26.500.000	3.395.000	36.000.000	41.550.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000	28.500.000	-	28.500.000	28.500.000	-	28.500.000	28.500.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	42.810.000	38.247.750	-	38.247.750	38.247.750	-	38.247.750	4.562.250	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	4.575.000	3.683.750	-	3.683.750	3.683.750	-	3.683.750	891.250	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.135.000	3.258.750	-	3.258.750	3.258.750	-	3.258.750	876.250	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 01 10	Belanja dokumen/keperluan administrasi tender	240.000	225.000	-	225.000	225.000	-	225.000	15.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 02	Belanja bahan material	18.476.000	17.770.000	-	17.770.000	17.770.000	-	17.770.000	656.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 06	Belanja bahan alat perlengkapan	5.848.000	4.504.500	-	4.504.500	4.504.500	-	4.504.500	1.343.500	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 06 01	Belanja cetak	5.200.000	3.910.000	-	3.910.000	3.910.000	-	3.910.000	1.290.000	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	618.000	594.500	-	594.500	594.500	-	594.500	53.500	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman rapat	13.961.000	12.289.500	-	12.289.500	12.289.500	-	12.289.500	1.671.500	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.289.500	12.289.500	-	12.289.500	12.289.500	-	12.289.500	12.289.500	
1 02 1 02 01 16 16 5 2 2 11 02 01	Honorarium Non PNS	22.000.000	18.350.000	-	18.350.000	18.350.000	-	18.350.000	3.650.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang penggantian transpor PNS	5.670.000	3.710.000	-	3.710.000	3.710.000	-	3.710.000	1.960.000	(1.680.000)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.670.000	18.350.000	27.060.000	3.710.000	20.030.000	23.740.000	5.510.000	(1.680.000)	(1.680.000)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1	BELAJA PEGAWAI	31.038.000	21.752.000	35.462.000	3.710.000	27.142.000	27.142.000	7.576.000	(1.680.000)	(1.680.000)
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	16.080.000	16.080.000	-	16.080.000	16.080.000	-	16.080.000	16.080.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 01 01	Honorarium penuh pelaksana kegiatan	15.450.000	15.450.000	-	15.450.000	15.450.000	-	15.450.000	15.450.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang penggantian transpor PNS	630.000	630.000	-	630.000	630.000	-	630.000	630.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	61.550.000	61.550.000	9.500.000	36.000.000	26.500.000	9.500.000	36.000.000	41.550.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	5.368.000	3.402.000	-	3.402.000	3.402.000	-	3.402.000	1.966.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	343.000	-	-	-	-	-	-	343.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	343.000	-	-	-	-	-	-	343.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 02	Belanja bahan material	4.500.000	2.877.000	-	2.877.000	2.877.000	-	2.877.000	1.623.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 04	Belanja bahan alat perlengkapan	4.500.000	2.877.000	-	2.877.000	2.877.000	-	2.877.000	1.623.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan perlengkapan	525.000	525.000	-	525.000	525.000	-	525.000	525.000	
1 02 1 02 01 17 02 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	525.000	525.000	-	525.000	525.000	-	525.000	525.000	
1 02 1 02 01 17 04	Perubahan persediaan dan persediaan barang di bidang obat dan bahan	13.416.000	875.000	875.000	875.000	875.000	5.915.000	7.491.000		
1 02 1 02 01 17 04 5 2 1	BELAJA PEGAWAI	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000	5.050.000	
1 02 1 02 01 17 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000	5.050.000	
1 02 1 02 01 17 04 5 2 1 01 01	Honorarium penuh pelaksana kegiatan	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000	5.050.000	-	5.050.000	5.050.000	



KODE REKENING	URAIAN	JMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UUDP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.366.000	-	875.000	875.000	875.000	-	875.000	7.491.000	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	111.000	-	-	-	-	-	-	111.000	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	111.000	-	-	-	-	-	-	111.000	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	875.000	-	875.000	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	875.000	-	875.000	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	7.380.000	-	-	-	-	-	-	7.380.000	-
1 02 1 02 01 17 04 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.380.000	-	-	-	-	-	-	7.380.000	-
1 02 1 02 01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	280.957.000	144.705.100	29.167.500	173.872.600	159.037.600	31.707.500	192.745.100	186.154.400	(18.862.500)
1 02 1 02 01 19 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	47.445.000	29.100.000	10.915.000	40.015.000	31.015.000	9.000.000	40.015.000	7.430.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.965.000	23.100.000	10.915.000	34.015.000	25.015.000	9.000.000	34.015.000	6.950.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	17.000.000	-	10.600.000	10.600.000	1.600.000	9.000.000	18.600.000	6.400.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 01 10	Belanja dekorasi	17.000.000	-	10.600.000	10.600.000	1.600.000	9.000.000	18.600.000	6.400.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	23.815.000	23.100.000	315.000	23.415.000	23.415.000	-	23.415.000	400.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 06 01	Belanja cetak	23.500.000	23.100.000	-	23.100.000	23.100.000	-	23.100.000	400.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	315.000	-	315.000	315.000	315.000	-	315.000	-	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 3	BELANJA MODAL	4.980.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	480.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 3 11	Belanja modal perlengkapan kantor	4.980.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	480.000	-
1 02 1 02 01 19 01 5 2 3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	4.980.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	480.000	-
1 02 1 02 01 19 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	46.766.000	37.217.000	980.000	38.197.000	38.197.000	962.500	39.159.500	8.569.000	(962.500)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	30.410.000	21.687.500	980.000	22.667.500	22.667.500	962.500	23.630.000	7.742.500	(962.500)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.225.000	6.425.000	805.000	7.230.000	7.230.000	437.500	7.667.500	1.995.000	(437.500)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	7.525.000	4.725.000	805.000	5.530.000	5.530.000	437.500	5.967.500	1.995.000	(437.500)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	21.185.000	15.262.500	175.000	15.437.500	15.437.500	525.000	15.962.500	5.747.500	(525.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000	5.440.000	-	5.440.000	5.440.000	-	5.440.000	1.060.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	12.685.000	9.822.500	175.000	9.997.500	9.997.500	525.000	10.522.500	2.687.500	(525.000)
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.356.000	15.529.500	-	15.529.500	15.529.500	-	15.529.500	826.500	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	3.848.000	3.841.500	-	3.841.500	3.841.500	-	3.841.500	6.500	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.298.000	3.291.500	-	3.291.500	3.291.500	-	3.291.500	6.500	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	150.000	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 01 10	Belanja dekorasi	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	700.000	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	700.000	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	11.808.000	10.988.000	-	10.988.000	10.988.000	-	10.988.000	820.000	-
1 02 1 02 01 19 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.808.000	10.988.000	-	10.988.000	10.988.000	-	10.988.000	820.000	-
1 02 1 02 01 19 04	Peningkatan pendidikan tenaga pemulih kesehatan	43.246.000	25.389.850	-	25.389.850	25.389.850	-	25.389.850	17.856.150	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	22.517.500	13.177.500	-	13.177.500	13.177.500	-	13.177.500	9.340.000	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.212.500	3.212.500	-	3.212.500	3.212.500	-	3.212.500	-	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	-	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	1.312.500	1.312.500	-	1.312.500	1.312.500	-	1.312.500	-	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	19.305.000	9.965.000	-	9.965.000	9.965.000	-	9.965.000	9.340.000	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.855.000	6.120.000	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000	7.735.000	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	5.450.000	3.845.000	-	3.845.000	3.845.000	-	3.845.000	1.605.000	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.728.500	12.212.350	-	12.212.350	12.212.350	-	12.212.350	8.516.150	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	12.428.000	4.762.350	-	4.762.350	4.762.350	-	4.762.350	7.665.650	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	11.878.000	4.212.350	-	4.212.350	4.212.350	-	4.212.350	7.665.650	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	150.000	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 01 10	Belanja dekorasi	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	-

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah	REALISASI					ANGGARAN	URSAH
			SP3D	SP3D	SP3D	SP3D	SP3D		
1	3	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3+9)	11 = (6+9)
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengendalian	2.150.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	650.500	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 06 01	Belanja cetak	1.275.500	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	550.500	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 06 02	Belanja pengendalian	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	90.000	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	1.150.000	-
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	1.150.000	-
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 1	BELAJA PEGAWAI	100.605.000	26.138.750	10.552.500	36.691.250	37.564.750	11.265.000	48.911.250	63.913.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 1 01	Honorarium PNS	79.470.000	23.087.500	10.552.500	33.640.000	34.515.000	11.047.500	45.562.500	45.830.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan	56.455.000	16.082.500	10.202.500	26.285.000	26.302.500	4.415.000	30.717.500	30.717.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 1 01 01 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.300.000	-	-	2.450.000	2.450.000	-	3.850.000	-
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 1 01 01 02	Honorarium Non PNS	13.637.500	10.202.500	350.000	7.355.000	8.212.500	6.602.500	14.815.000	15.660.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 1 01 03	Honorarium/transportasi pengantar transportasi Non PNS	23.015.000	7.005.000	350.000	7.355.000	8.212.500	6.602.500	14.815.000	15.660.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	21.135.000	3.051.250	-	3.051.250	3.051.250	217.500	3.368.750	18.081.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	2.736.000	193.500	-	193.500	193.500	95.000	188.500	1.934.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.708.000	133.500	-	133.500	133.500	95.000	128.500	1.574.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	360.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengendalian	420.000	131.250	-	131.250	131.250	122.500	253.750	6.637.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06 01	Belanja cetak	5.325.000	131.250	-	131.250	131.250	122.500	253.750	6.637.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06 02	Belanja pengendalian	12.218.000	2.726.500	-	2.726.500	2.726.500	122.500	2.726.500	9.991.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	12.218.000	2.726.500	-	2.726.500	2.726.500	122.500	2.726.500	9.991.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.218.000	2.726.500	-	2.726.500	2.726.500	122.500	2.726.500	9.991.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	8.665.500	6.609.500	-	6.609.500	6.609.500	-	6.609.500	1.455.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	116.000	112.500	-	112.500	112.500	-	112.500	3.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	116.000	112.500	-	112.500	112.500	-	112.500	3.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengendalian	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	304.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 06 01	Belanja cetak	304.000	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	304.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 06 02	Belanja pengendalian	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	1.148.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	6.560.000	5.412.000	-	5.412.000	5.412.000	-	5.412.000	1.148.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.560.000	5.412.000	-	5.412.000	5.412.000	-	5.412.000	1.148.000
1 02 1 02 01 20	Program Perubahan Gaji Masyarakat	262.908.000	53.859.150	188.525.650	242.384.800	77.738.450	167.941.350	245.679.800	25.235.000
1 02 1 02 01 20 02	Pembelian tambahan makanan dan vitamin	193.220.000	19.340.000	169.774.350	189.114.350	24.468.000	164.646.350	189.114.350	4.505.650
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1	BELAJA PEGAWAI	18.140.000	12.107.500	3.220.000	15.327.500	15.327.500	-	15.327.500	2.812.500
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.190.000	8.738.000	2.310.000	11.040.000	11.040.000	-	11.040.000	1.150.000
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan	4.000.000	3.450.000	950.000	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	-
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01 01 01	Honorarium tim pengabdian barang dan jasa	750.000	-	-	-	-	-	-	750.000
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.040.000	5.280.000	1.360.000	6.640.000	6.640.000	-	6.640.000	400.000
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 03	Honorarium Non PNS	5.950.000	3.377.500	910.000	4.287.500	4.287.500	-	4.287.500	1.662.500
1 02 1 02 01 20 02 5 2 1 03 03	Honorarium/transportasi pengantar transportasi Non PNS	5.950.000	3.377.500	910.000	4.287.500	4.287.500	-	4.287.500	1.662.500
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	175.080.000	7.233.500	166.554.350	173.786.850	9.140.500	164.646.350	173.786.850	1.293.150
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.592.000	1.177.500	277.500	1.449.000	1.449.000	-	1.449.000	143.000
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.434.000	1.051.000	277.500	1.329.000	1.329.000	-	1.329.000	109.000
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	158.000	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	30.000
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 02 02	Belanja bahan material	165.000.000	164.646.350	164.646.350	164.646.350	164.646.350	164.646.350	164.646.350	353.650
1 02 1 02 01 20 02 5 2 2 02 02 02	Belanja bahan obat-obatan	165.000.000	164.646.350	164.646.350	164.646.350	164.646.350	164.646.350	164.646.350	353.650

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah	REALISASI					ANGGARAN	URSAH
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	6 (4+5)	7	B	S/D BULAN INI	9 (7+8)
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengendalian	2.150.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	650.500
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 06	Belanja cetak	1.275.500	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	550.500
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 06	Belanja pengendalian	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	90.000
1 02 1 02 01 19 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	-
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	100.605.000	26.138.750	10.552.500	36.691.250	37.564.750	11.265.000	48.911.250	63.913.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 1	BELAJA PEGAWAI	79.470.000	23.087.500	10.552.500	33.640.000	34.515.000	11.047.500	45.562.500	45.830.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 1 01	Honorarium PNS	56.455.000	16.082.500	10.202.500	26.285.000	26.302.500	4.415.000	30.717.500	30.717.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 1 01	Honorarium pengantar transportasi PNS	6.300.000	-	-	2.450.000	2.450.000	-	3.850.000	-
1 02 1 02 01 19 05 5 2 1 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	50.155.000	13.637.500	10.202.500	23.633.000	23.852.500	4.445.000	28.797.500	26.120.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	23.015.000	7.005.000	350.000	7.355.000	8.212.500	6.602.500	14.815.000	15.660.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 1 03	Honorarium/transportasi pengantar transportasi Non PNS	23.015.000	7.005.000	350.000	7.355.000	8.212.500	6.602.500	14.815.000	15.660.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	21.135.000	3.051.250	-	3.051.250	3.051.250	21.500	3.368.750	18.081.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	2.736.000	193.500	-	193.500	193.500	95.000	188.500	1.934.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 01	Belanja dokumentasi/administrasi tender	1.708.000	133.500	-	133.500	133.500	95.000	128.500	1.574.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengendalian	420.000	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	360.000
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06	Belanja cetak	5.325.000	131.250	-	131.250	131.250	-	253.750	6.637.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 06	Belanja pengendalian	12.218.000	2.726.500	-	2.726.500	2.726.500	122.500	2.726.500	9.991.500
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	12.218.000	131.250	-	131.250	131.250	122.500	253.750	1.332.750
1 02 1 02 01 19 05 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman rapat	12.218.000	2.726.500	-	2.726.500	2.726.500	-	2.726.500	9.991.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2	BELAJA BARANG DAN JASA	8.665.500	6.609.500	-	6.609.500	6.609.500	-	6.609.500	1.455.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	116.000	112.500	-	112.500	112.500	-	112.500	3.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 01	Belanja alat tulis kantor	116.000	112.500	-	112.500	112.500	-	112.500	3.500
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengendalian	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	304.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 06	Belanja cetak	304.000	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	304.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 06	Belanja pengendalian	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	1.148.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	6.560.000	5.412.000	-	5.412.000	5.412.000	-	5.412.000	1.148.000
1 02 1 02 01 19 06 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman rapat	6.560.000	5.412.000	-	5.412.000	5.412.000	-	5.412.000	1.148.000



[illegible]





KODE REKENING	URATAN	Jumlah Anggaran	REALISASI						SLISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UUDP
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10=(3-6)	11=(6-9)
1 02 1 02 01 22 06 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000	-	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	66.585.000	53.960.000	-	53.960.000	53.960.000	-	53.960.000	12.625.000	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	510.000	510.000	-	510.000	510.000	-	510.000	-	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	66.075.000	53.450.000	-	53.450.000	53.450.000	-	53.450.000	12.625.000	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.313.000	14.783.000	12.000.000	26.783.000	14.783.000	12.000.000	26.783.000	1.530.000	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	331.750	331.750	-	331.750	331.750	-	331.750	-	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	331.750	331.750	-	331.750	331.750	-	331.750	-	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	13.631.250	131.250	12.000.000	12.131.250	131.250	12.000.000	12.131.250	1.500.000	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 06 01	Belanja cetak	13.500.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	1.500.000	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	131.250	131.250	-	131.250	131.250	-	131.250	-	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	14.350.000	14.320.000	-	14.320.000	14.320.000	-	14.320.000	30.000	-
1 02 1 02 01 22 06 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.350.000	14.320.000	-	14.320.000	14.320.000	-	14.320.000	30.000	-
1 02 1 02 01 22 09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	98.495.000	41.313.100	37.293.400	78.606.500	41.313.100	41.520.900	82.834.000	19.881.500	(4.227.500)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	64.460.000	22.885.000	29.520.000	52.405.000	22.885.000	32.647.500	55.532.500	12.055.000	(1.127.500)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01	Honorarium PNS	30.300.000	8.620.000	18.112.500	26.732.500	8.620.000	18.197.500	26.817.500	3.567.500	(85.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12.650.000	-	12.650.000	12.650.000	-	12.650.000	12.650.000	-	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.650.000	5.610.000	2.550.000	8.160.000	5.610.000	2.040.000	7.650.000	(510.000)	510.000
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	10.000.000	3.010.000	2.912.500	5.922.500	3.010.000	3.507.500	4.077.500	4.077.500	(595.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	34.160.000	14.265.000	11.407.500	25.672.500	14.265.000	14.450.000	28.715.000	8.487.500	(1.042.500)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.360.000	-	-	-	-	1.020.000	1.020.000	1.360.000	(1.020.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	32.800.000	14.265.000	11.407.500	25.672.500	14.265.000	13.430.000	27.695.000	7.127.500	(2.022.500)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.035.000	18.428.100	7.773.400	26.201.500	18.428.100	8.873.400	27.301.500	7.813.500	(1.100.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	480.000	226.500	250.000	476.500	226.500	250.000	476.500	3.500	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	480.000	226.500	250.000	476.500	226.500	250.000	476.500	3.500	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	10.275.000	5.221.600	253.400	5.475.000	5.221.600	253.400	5.475.000	4.800.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 06 01	Belanja cetak	9.750.000	4.950.000	-	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	4.900.000	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	525.000	271.600	253.400	525.000	271.600	253.400	525.000	-	-
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	23.280.000	12.980.000	7.270.000	20.250.000	12.980.000	8.370.000	21.350.000	3.030.000	(1.100.000)
1 02 1 02 01 22 09 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.280.000	12.980.000	7.270.000	20.250.000	12.980.000	8.370.000	21.350.000	3.030.000	(1.100.000)
1 02 1 02 01 22 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	73.445.000	64.492.500	-	64.492.500	64.502.500	-	64.502.500	8.952.500	(10.000)
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	41.300.000	32.377.500	-	32.377.500	32.387.500	-	32.387.500	8.922.500	(10.000)
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.130.000	21.905.000	-	21.905.000	22.132.500	-	22.132.500	1.225.000	(227.500)
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.830.000	16.575.000	-	16.575.000	16.575.000	-	16.575.000	255.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	4.250.000	3.780.000	-	3.780.000	4.007.500	-	4.007.500	970.000	(227.500)
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	18.170.000	10.472.500	-	10.472.500	10.255.000	-	10.255.000	7.697.500	217.500
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	595.000	-	-	-	-	-	-	595.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	17.575.000	10.472.500	-	10.472.500	10.255.000	-	10.255.000	7.102.500	217.500
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.145.000	32.115.000	-	32.115.000	32.115.000	-	32.115.000	30.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	520.000	520.000	-	520.000	520.000	-	520.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	520.000	520.000	-	520.000	520.000	-	520.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	30.250.000	30.720.000	-	30.720.000	30.720.000	-	30.720.000	30.000	-
1 02 1 02 01 22 10 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.250.000	30.720.000	-	30.720.000	30.720.000	-	30.720.000	30.000	-
1 02 1 02 01 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	29.624.000	-	-	-	-	-	-	29.624.000	-
1 02 1 02 01 23 01	Penyusunan Standar Kesehatan	29.624.000	-	-	-	-	-	-	29.624.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	22.160.000	-	-	-	-	-	-	22.160.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	22.160.000	-	-	-	-	-	-	22.160.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7.300.000	-	-	-	-	-	-	7.300.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.160.000	-	-	-	-	-	-	2.160.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	12.700.000	-	-	-	-	-	-	12.700.000	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SISA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI 6 = (4+5)	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI 9 = (7+8)	ANGGARAN 10 = (3-6)	UDRP 11 = (6-9)
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (6-9)
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.464.000	-	-	-	-	-	-	7.464.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	2.184.000	-	-	-	-	-	-	2.184.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.518.000	-	-	-	-	-	-	1.518.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	266.000	-	-	-	-	-	-	266.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	3.280.000	-	-	-	-	-	-	3.280.000	-
1 02 1 02 01 23 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.280.000	-	-	-	-	-	-	3.280.000	-
1 02 1 02 01 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	374.074.000	180.735.700	128.492.500	309.228.200	181.768.200	149.680.000	331.448.200	225.444.000	(22.220.000)
1 02 1 02 01 29 02	Imunisasi bagi anak balita	348.605.000	157.665.000	128.492.500	286.157.500	158.697.500	149.417.500	308.115.000	62.447.500	(21.957.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	287.930.000	116.365.000	128.492.500	244.857.500	117.397.500	136.717.500	254.115.000	41.072.500	(9.257.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 01	Honorarium PNS	47.130.000	21.507.500	752.500	22.260.000	22.260.000	7.630.000	29.890.000	24.870.000	(7.630.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3.450.000	-	-	-	-	-	-	3.450.000	-
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	43.680.000	21.507.500	752.500	22.260.000	22.260.000	7.630.000	29.890.000	21.420.000	(12.500.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	240.800.000	94.857.500	127.740.000	222.597.500	95.137.500	129.087.500	224.225.000	18.202.500	(1.627.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	240.800.000	94.857.500	127.740.000	222.597.500	95.137.500	129.087.500	224.225.000	18.202.500	(1.627.500)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.675.000	41.300.000	-	41.300.000	41.300.000	12.700.000	54.000.000	19.375.000	(12.700.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 02	Belanja bahan material	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	59.625.000	41.300.000	-	41.300.000	41.300.000	12.700.000	54.000.000	18.325.000	(12.700.000)
1 02 1 02 01 29 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	59.625.000	41.300.000	-	41.300.000	41.300.000	12.700.000	54.000.000	18.325.000	(12.700.000)
1 02 1 02 01 29 04	Pelestian dan pendidikan perawatan anak balita	25.469.000	23.070.700	-	23.070.700	23.070.700	262.500	23.333.200	2.398.300	(262.500)
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.225.000	16.175.000	-	16.175.000	16.175.000	262.500	16.437.500	1.050.000	(262.500)
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.825.000	13.775.000	-	13.775.000	13.775.000	262.500	14.037.500	1.050.000	(262.500)
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000	5.900.000	-	5.900.000	5.900.000	-	5.900.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	2.925.000	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	262.500	2.137.500	1.050.000	(262.500)
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.244.000	6.895.700	-	6.895.700	6.895.700	-	6.895.700	1.348.300	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	742.000	654.200	-	654.200	654.200	-	654.200	87.800	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	682.000	609.200	-	609.200	609.200	-	609.200	72.800	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	60.000	45.000	-	45.000	45.000	-	45.000	15.000	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	962.500	962.500	-	962.500	962.500	-	962.500	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 06 02	Belanja penggandaan	962.500	962.500	-	962.500	962.500	-	962.500	-	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	6.539.500	5.279.000	-	5.279.000	5.279.000	-	5.279.000	1.260.500	-
1 02 1 02 01 29 04 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.539.500	5.279.000	-	5.279.000	5.279.000	-	5.279.000	1.260.500	-
1 02 1 02 01 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lelara	162.882.000	89.907.200	30.822.500	120.729.700	99.508.200	46.350.000	145.858.200	42.152.300	(25.128.500)
1 02 1 02 01 30 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	162.882.000	89.907.200	30.822.500	120.729.700	99.508.200	46.350.000	145.858.200	42.152.300	(25.128.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	118.090.000	60.907.500	30.822.500	91.730.000	66.992.500	36.917.500	101.910.000	26.360.000	(12.180.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	22.340.000	18.400.000	1.032.500	19.432.500	19.415.000	2.397.500	21.812.500	2.907.500	(2.380.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5.400.000	5.400.000	-	5.400.000	5.400.000	-	5.400.000	-	-
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.570.000	3.060.000	-	3.060.000	3.060.000	-	3.060.000	510.000	-
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	11.370.000	9.940.000	1.032.500	10.972.500	10.955.000	2.397.500	13.352.500	2.397.500	(2.380.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	95.750.000	42.507.500	29.790.000	72.297.500	47.577.500	34.520.000	84.097.500	23.452.500	(9.600.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	84.000.000	36.110.000	28.460.000	64.570.000	39.850.000	33.260.000	73.110.000	19.430.000	(8.540.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	11.750.000	6.397.500	1.330.000	7.727.500	7.727.500	1.260.000	8.987.500	4.022.500	(1.260.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.792.000	28.999.700	-	28.999.700	32.515.700	9.432.500	41.948.200	15.792.300	(12.948.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.222.000	1.222.500	-	1.222.500	1.222.500	-	1.222.500	95.100	-
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.128.000	1.032.900	-	1.032.900	1.032.900	-	1.032.900	95.100	-
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	195.000	195.000	-	195.000	195.000	-	195.000	-	-



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						SSA	
			S/D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	SP3 BULAN INI	S/D BULAN INI	ANGGARAN	UDRP
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (3-6)	11 = (8-9)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 02	Belanja bahan material	9.000.000	6.799.800	-	6.799.800	8.995.800	-	8.995.800	2.200.200	(2.196.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000	6.799.800	-	6.799.800	8.995.800	-	8.995.800	2.200.200	(2.196.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	6.050.000	937.500	-	937.500	937.500	5.112.500	6.050.000	5.112.500	(5.112.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 06 01	Belanja cetak	5.900.000	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	(5.000.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	1.050.000	937.500	-	937.500	937.500	112.500	1.050.000	112.500	(112.500)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	28.419.000	20.034.500	-	20.034.500	21.354.500	4.320.000	25.674.500	8.384.500	(5.640.000)
1 02 1 02 01 30 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.419.000	20.034.500	-	20.034.500	21.354.500	4.320.000	25.674.500	8.384.500	(5.640.000)
1 02 1 02 01 32	Program Pemeliharaan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	61.591.000	50.147.500	820.000	50.667.500	50.667.500	6.632.500	59.300.000	2.283.500	(6.632.500)
1 02 1 02 01 32 01	Pemeliharaan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	41.053.000	35.459.000	82.500	35.546.500	35.546.500	4.650.000	40.196.500	5.504.500	(4.650.000)
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.420.000	21.000.000	87.500	21.087.500	21.087.500	-	21.087.500	332.500	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.020.000	17.600.000	87.500	17.687.500	17.687.500	-	17.687.500	332.500	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.290.000	9.290.000	-	9.290.000	9.290.000	-	9.290.000	-	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	2.730.000	2.310.000	87.500	2.397.500	2.397.500	-	2.397.500	332.500	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.400.000	3.400.000	-	3.400.000	3.400.000	-	3.400.000	-	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	3.400.000	3.400.000	-	3.400.000	3.400.000	-	3.400.000	-	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.633.000	14.459.000	-	14.459.000	14.459.000	4.650.000	19.109.000	5.174.000	(4.650.000)
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	2.309.000	2.135.000	-	2.135.000	2.135.000	-	2.135.000	174.000	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2.234.000	2.060.000	-	2.060.000	2.060.000	-	2.060.000	174.000	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	75.000	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	-	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 02	Belanja bahan material	4.952.000	4.950.000	-	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	2.000	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.952.000	4.950.000	-	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	2.000	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	5.525.000	875.000	-	875.000	875.000	4.650.000	5.525.000	4.650.000	(4.650.000)
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 06 01	Belanja cetak	4.650.000	-	-	-	-	4.650.000	4.650.000	4.650.000	(4.650.000)
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	875.000	875.000	-	875.000	875.000	-	875.000	-	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	6.847.000	6.499.000	-	6.499.000	6.499.000	-	6.499.000	348.000	-
1 02 1 02 01 32 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.847.000	6.499.000	-	6.499.000	6.499.000	-	6.499.000	348.000	-
1 02 1 02 01 32 04	Pemetaan Ibu Hamil dan Perencanaan Ibu Hamil Resiko Tinggi	20.538.000	14.688.500	432.500	15.121.000	15.121.000	3.982.500	19.103.500	5.417.000	(3.982.500)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.300.000	8.927.500	87.500	9.015.000	9.015.000	3.557.500	12.572.500	4.285.000	(3.557.500)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1 01 03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.980.000	2.980.000	-	2.980.000	2.980.000	-	2.980.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1 01 04	Honorarium/uang pengganti transpor PNS	820.000	820.000	-	820.000	820.000	-	820.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	8.000.000	3.627.500	87.500	3.715.000	3.715.000	1.557.500	7.272.500	4.285.000	(3.557.500)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 1 02 03	Honorarium/uang pengganti transpor Non PNS	8.000.000	3.627.500	87.500	3.715.000	3.715.000	1.557.500	7.272.500	4.285.000	(3.557.500)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.238.000	5.761.000	345.000	6.106.000	6.106.000	425.000	6.531.000	1.132.000	(425.000)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai	1.298.000	959.000	-	959.000	959.000	75.000	1.034.000	339.000	(75.000)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	959.000	959.000	-	959.000	959.000	-	959.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 01 02	Belanja dokumentasi/administrasi tender	339.000	-	-	-	-	75.000	75.000	339.000	(75.000)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 06	Belanja cetak dan pengandaan	2.988.000	1.850.000	345.000	2.195.000	2.195.000	350.000	2.545.000	793.000	(350.000)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 06 01	Belanja cetak	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 06 02	Belanja pengandaan	1.488.000	350.000	345.000	695.000	695.000	350.000	1.045.000	793.000	(350.000)
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	2.952.000	2.952.000	-	2.952.000	2.952.000	-	2.952.000	-	-
1 02 1 02 01 32 04 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.952.000	2.952.000	-	2.952.000	2.952.000	-	2.952.000	-	-
1 02 1 02 01 16	Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat	75.000.000	73.500.000	-	73.500.000	73.500.000	-	73.500.000	1.500.000	-
1 02 1 02 01 16 01	Pemeliharaan dan pemeliharaan kesehatan	75.000.000	73.500.000	-	73.500.000	73.500.000	-	73.500.000	1.500.000	-
1 02 1 02 01 16 01 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	75.000.000	-	73.500.000	73.500.000	-	73.500.000	73.500.000	1.500.000	-
1 02 1 02 01 16 01 5 2 3 01 03	Belanja modal pengadaan Tanah sarana kesehatan Puskesmas	75.000.000	-	73.500.000	73.500.000	-	73.500.000	73.500.000	1.500.000	-

Mengetahui :  
PENGETUA ANGGARAN  
DINAS KESEHATAN  
dr. HAWARDI MKM  
Np. 19630908 199111 1 001

Kasubag. Kasangan

100401  
Np. 1950014 197902 1 001